



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 -2029

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung visi dan misi Bupati dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. menjabarkan Visi, Misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- b. menyediakan acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD dan RKPD dalam periode tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Rencana Strategis Dinas Sosial;
 - j. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- m. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- o. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- q. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- r. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- s. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- t. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- u. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Rencana Strategis Dinas Perikanan;
- w. Rencana Strategis Dinas Pangan;
- x. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- dd. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- ee. Rencana Strategis Kecamatan Guguk;
- ff. Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh;
- gg. Rencana Strategis Kecamatan Mungka;
- hh. Rencana Strategis Kecamatan Suliki;
- ii. Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan;
- jj. Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh;
- kk. Rencana Strategis Kecamatan Luak;
- ll. Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- mm. Rencana Strategis Kecamatan Harau;
- nn. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru;
- pp. Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX.

- (5) Rencana Strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (8) Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q

tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (22) Rencana Strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Strategis Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Strategis Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (35) Rencana Strategis Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Strategis Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Strategis Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Strategis Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Strategis Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana Strategis Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Strategis Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Strategis Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Strategis Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (46) Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (47) Rencana Strategis Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif serta Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah mempedomani perubahan RPJMD.
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan Perangkat Daerah maka rencana strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025
NOMOR 42

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Renstra 2025-2029 disusun dengan menempuh beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal dan rancangan Renstra. Penyusunan ini juga disempurnakan melalui pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah (PD) sampai akhirnya dirumuskan menjadi rancangan akhir renstra yang dilanjutkan dengan penetapan Renstra. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang telah melalui proses dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan program kegiatan daerah yang akan dicapai selama lima tahun serta program kegiatan provinsi dan nasional. Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Desember 2025
Plt. KEPALA



ALFIAN, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197612201995111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	41
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029...41	
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .44	
3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	46
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...47	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	50
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	159
BAB V PENUTUP	164
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	164
5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	165
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	25
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 2.4 Asset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	26
Tabel 2.5 Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2025.....	27
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	30
Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37
Tabel 2.8 Perumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029	45
Tabel 3.2 Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	46
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.....	48
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra.....	52
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	99
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	157
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	161
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	162

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	28
Grafik 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	2
Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapandan Tatacara Penyusunan Renstra PD.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

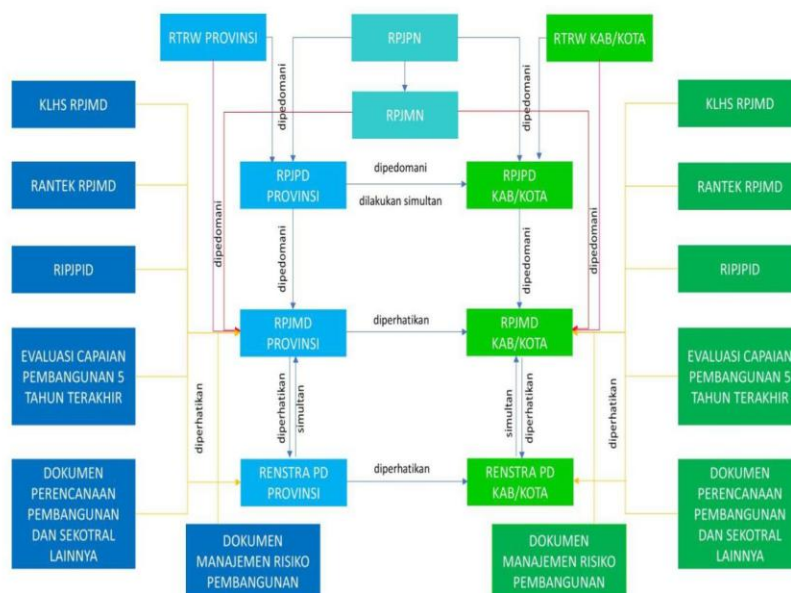
Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun.

Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

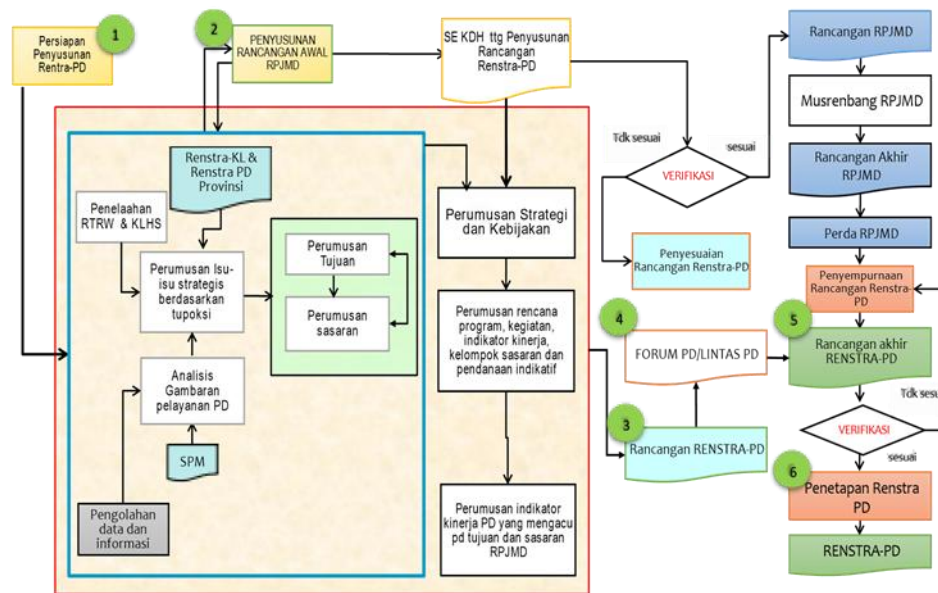
Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan

umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra PD digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapandan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan program, kegiatan serta subkegiatan yang berpedoman pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2025-2029 “Lima Puluh Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi program, kegiatan dan subkegiatan selama lima tahun ke depan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 3) Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 4) Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara tertib dan berkesinambungan terkait penyelenggaraan bidang urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab I memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab II memuat :

1. Subbab gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat:
 - a. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Kelompok Sasaran layanan; dan
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab III memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab IV memuat :

1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti yang diuraikan dibawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan BMD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
5. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PTK Paud dan PNF
 - b. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 - c. Seksi PTK SMP.
7. UPTD.

2.1.1.A. Tugas dan Fungsi

I. Dinas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6) yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

- a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- k. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas

di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- l. menyusun dan menelaah peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- r. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- s. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- t. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- u. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- v. mengelola perencanaan dan program Dinas;

- w. mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- x. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- y. memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan,
- b. melaksanakan urusan kerumahtanggaan,
- c. melaksanakan urusan organisasi,
- d. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- e. menyusun bahan rancangan peraturan perundangundangan;
- f. memfasilitasi bantuan hukum;
- g. mengelola kepegawaian di bidang pengelolaan bidang Pembinaan PAUD & PNF, Pembinaan DIKDAS, Pembinaan SMP, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan;
- h. mengkoordinasikan dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang Pembinaan PAUD & PNF, Pembinaan DIKDAS, Pembinaan SMP, Kebudayaan dan Pembinaan Ketenagaan.
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan barang milik daerah. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan BMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas;
- d. membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- g. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- h. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan dan BMD sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. mengoordinasikan penambahan, penyusutan dan penghapusan Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan telaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyusun dan menghimpun perencanaan dan program kerja bidang-bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang perencanaan dan pelaporan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- g. mengoordinasikan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- h. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan tahunan kegiatan Dinas;
- l. menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Bidang Pembinaan PAUD & PNF sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan draft Rencana Strategis (RENSTRA) di Bidang PAUD & PNF dan draf Rencana Kerja (RENJA) di Bidang PAUD & PNF;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada Pendidikan Masyarakat dan Paket A dan B;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik

Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kurikulum, penilaian dan peserta didik bidang pendidikan anak usia dini. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan telaah peraturan perundang-undangan urusan bidang Pembinaan PAUD & PNF di Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik;
 - d. menyusun dan menghimpun perencanaan dan program kerja pada seksi kurikulum, peniliasi dan peserta didik sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembinaan dan pelaporan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi kurikulum, penilian dan peserta didik;
 - g. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi kurikulum, penilaian dan peserta didik;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kurikulum, penilaian dan peserta didik kegiatan pembinaan bidang pendidikan non formal. Uraian tugas Seksi Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Pendidikan Non Formal;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendidikan Non Formal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan telaah peraturan perundang-undangan urusan bidang Pembinaan PAUD & PNF di Seksi Pendidikan Non Formal;
- d. menyusun dan menghimpun perencanaan dan program kerja pada seksi Pendidikan Non Formal sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- e. merencanakan operasional kurikulum Pendidikan masyarakat dan Paket A dan B kabupaten sesuai dengan perancangan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga Pendidikan masyarakat dan Paket A dan B;
- g. melaksanakan pendataan, pengolahan dan penyajian data Pendidikan masyarakat dalam Pendidikan masyarakat dan Paket A dan B;
- h. mengembangkan kursus-kursus, keaksaraan fungsional dan program pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama Pendidikan keaksaraan fungsional dan pendidikan masyarakat;
- j. menyelenggarakan evaluasi pembelajaran pada pendidikan masyarakat keaksaraan fungsional tingkat kabupaten;

- k. mengembangkan sarana dan prasarana keaksaraan fungsional dan pendidikan masyarakat;
 - l. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi Pendidikan Non Formal;
 - m. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi Pendidikan Non Formal;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - e. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. membuat laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal.
 - g. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana:
 - h. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Bidang Pembinaan Dikdas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) di Bidang Pembinaan DIKDAS dan draf Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Pembinaan DIKDAS;
- c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- e. menyusun rencana kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dan Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri dari :

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kurikulum, penilaian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Uraian tugas seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan telaah peraturan perundang-undangan urusan bidang Pembinaan DIKDAS di Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- d. menyusun dan menghimpun perencanaan dan program kerja pada Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- e. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi kurikulum & penilaian;
- f. menyusun laporan tahunan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peserta didik dan pembangunan karakter serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pembinaan Pendidikan dasar. Uraian tugas seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan telaah peraturan perundang-undangan urusan bidang Pembinaan DIKDAS di Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - d. menyusun dan menghimpun perencanaan dan program kerja pada seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
 - e. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - f. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi kurikulum & penilaian;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kelembagaan, sarana dan prasarana tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pembinaan pendidikan dasar sesuai dengan pasal 14. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan DIKDAS;
 - d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan DIKDAS; dan
 - e. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan DIKDAS;
 - f. membuat laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan DIKDAS.
 - g. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana:

- h. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) di Bidang Kebudayaan dan draf Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Kebudayaan;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan bidang kebudayaan yang meliputi cagar budaya dan sejarah, kesenian dan tradisi dan tenaga kebudayaan;
- d. merumuskan pembinaan kebijakan teknis pengembangan bidang kebudayaan yang meliputi cagar budaya dan sejarah, kesenian dan tradisi dan tenaga kebudayaan;
- e. mengumpulkan data keragaman budaya yang sesuai standard nasional meliputi data cagar budaya dan sejarah, kesenian dan tradisi dan tenaga kebudayaan;
- f. menyelenggarakan pelayanan umum bidang kebudayaan dalam menunjang kependidikan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan dan pelestarian kekayaan dan keragaman budaya;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Kebudayaan dalam urusan cagar budaya dan permuseuman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi cagar budaya dan permeseuman sebagaimana di maksud sebagai berikut :

- a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas bagian cagar budaya dan permeseuman;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja seksi cagar budaya dan permeseuman;
- c. menyusun dan menyiapkan kebijakan daerah tentang cagar budaya dan permeseuman;

- d. merumuskan dan menyusun rencana teknis pelaksanaan registrasi penetapan cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta pengelolaan permuseuman;
 - e. melaksanakan pendataan terhadap benda-benda yang dianggap cagar budaya
 - f. melaksanakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
 - g. melaksanakan program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
 - h. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap SDM pengelola cagar budaya dan pengelola museum daerah.
 - j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya dan permuseuman
 - l. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Kebudayaan dalam urusan sejarah dan nilai tradisi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi sebagai mana di maksud adalah sebagai berikut :

- a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan tugas di seksi sejarah dan nilai tradisi;
- b. merumuskan dan menyusun rencana teknis program kerja seksi sejarah, tradisi;
- c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan di seksi sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelestarian sejarah dan tradisi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelestarian terhadap sejarah local, nilai-nilai tradisi dan budaya tak benda tak benda;

- g. melaksanakan lomba-lomba penulisan sejarah local daerah;
- h. melaksanakan event-event nilai tradisi dan budaya tak benda yang ada dalam rangka pembinaan dan pelestarian;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat dan komunitas lainnya.
- j. melaksanakan pendataan sejarah lokal, budaya tak benda, komunitas dan lembaga adat;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang sejarah, tradisi, pendataan budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- l. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendataan budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kebudayaan dalam urusan kesenian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian sebagai mana di maksud adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang pembinaan kesenian;
- b. merumuskan dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kesenian;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan kesenian;
- d. menyusun program pembinaan tenaga kesenian;
- e. menyusun dan melaksanakan program event-event seni dan budaya;
- f. menyusun dan melaksanakan program festival budaya daerah;
- g. melaksanakan pendataan sanggar seni yang ada di daerah.
- h. menyusun profil seni budaya daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi urusan pembinaan perfilman
- j. menyiapkan pelaksanaan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan dibidang pembinaan kesenian;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kesenian;
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

VI. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ketenagaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) di Bidang Pembinaan Ketenagaan dan draf Rencana Kerja (RENJA) di Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- c. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan PTK PAUD dan Non Formal, dan DIKDAS;
- d. menyusun bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan PTK PAUD dan Non Formal, dan DIKDAS;
- e. menyusun bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD dan Non Formal, dan DIKDAS;
- f. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD dan Non Formal, dan DIKDAS;
- g. menyusun bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten, antar kabupaten/kota dan provinsi; dan menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD dan Non Formal, dan DIKDAS;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, penghargaan dan perlindungan ketenagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- f. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- i. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- j. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi PTK SD

Seksi PTK SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, penghargaan dan perlindungan ketenagaan pendidikan sekolah dasar serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas seksi PTK SD sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas PTK SD;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi PTK SD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- e. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- f. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- g. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- h. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- i. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi PTK SD;
- j. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi PTK SD;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;
- m. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- n. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SD;
- o. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi PTK SD;
- p. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi PTK SD;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi PTK SMP

Seksi PTK SMP mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, penghargaan dan perlindungan ketenagaan pendidikan sekolah menengah pertama serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas seksi PTK SMP sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas PTK SMP;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi PTK SMP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- d. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- e. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- f. menyusun bahan pemantauan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- g. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- h. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP; dan
- i. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi PTK SMP;
- j. menyusun laporan tahunan kegiatan Seksi PTK SMP;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya;
- m. menyusun bahan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- n. menyusun laporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;

- o. membuat konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seksi PTK SMP;
- p. menyusun laporan tahunan kegiatan seksi PTK SMP;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

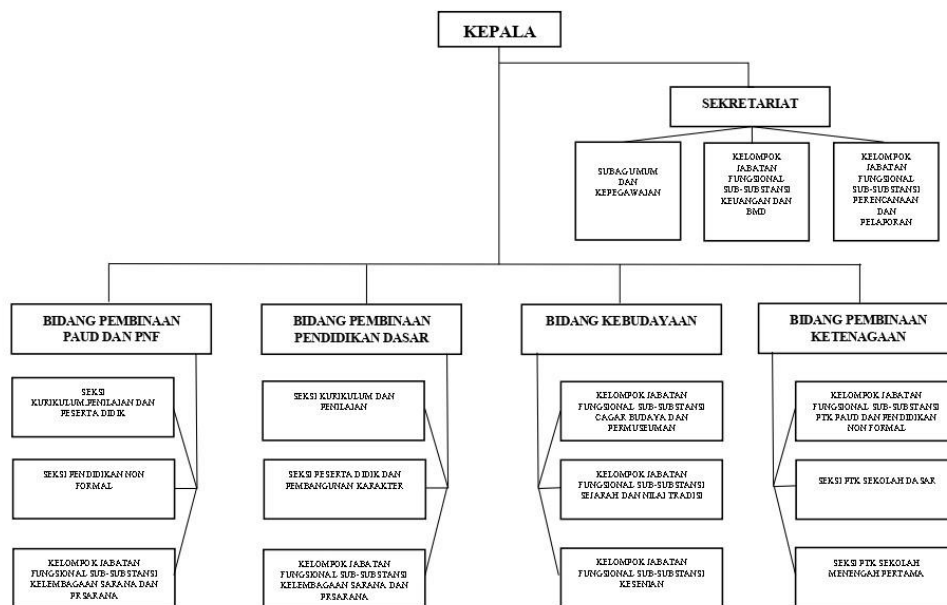
VII. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

2.1.1.B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.2.A. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 4.017 (empat ribu tujuh belas) orang, yang terdiri dari PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak. Jumlah PNS sebanyak 2682 orang, PPPK sebanyak 1322 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 13 orang. Tenaga Kontrak ini adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi, tenaga kebersihan dan sopir.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1.	I	-	-	2	2	4
2.	II	7	15	30	17	69

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
3.	III	233	696	442	505	1.876
4.	IV	244	425	63	1	733
5.	IX					1.322
6.	Non Golongan					13
TOTAL						4.017

Sumber : Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025 diolah

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
2.	Analisis Kebijakan Pertama	3
3.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1
4.	Fungsional Umum	124
5.	Guru	3.453
6.	Kepala Sekolah	374
7.	Pamong Belajar Pertama	2
8.	Pamong Budaya Muda	2
9.	Pamong Budaya Pertama	2
10.	Pengawas Sekolah	21
11.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1
12.	Penilik	9
13.	Perencana Ahli Muda	1
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
15.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	1
16.	Struktural	8
17.	Tenaga Kontrak	13
TOTAL		4.017

Sumber : Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025 diolah

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	866
2.	Perempuan	3.151
TOTAL		4.017

Sumber : Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025 diolah

2.1.2.B. Asset / Modal

Asset/Modal yang dimiliki kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berbentuk sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu:

Tabel 2.4
Asset/Modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama/ Jenis Barang	Nilai (Rp)
1.	Tanah	692.955.500
2.	Alat Besar	550.000
3.	Alat-Alat Angkutan	2.659.022.450
	- Kendaraan Roda Empat	868.276.000
	- Kendaraan Roda Dua	1.790.746.450
4.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	23.400.000
5.	Alat Pertanian	1.580.000
6.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.300.248.440
7.	Alat Laboratorium	1.205.000
8.	Peralatan Komputer	2.048.075.200
9.	Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	145.889.000
10.	Alat Keselamatan Kerja	46.250.000
11.	Gedung Dan Bangunan	7.934.335.384
12.	Tugu Titik Kontrol / Pasti	79.079.450
13.	Jaringan / Instalasi	62.500.075
14.	Bahan Perpustakaan	5.680.000
Jumlah		15.097.652.627

Sumber : Daftar BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.3.A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota juga merupakan IKU Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, adalah sebagaimana dijabarkan berikut ini :

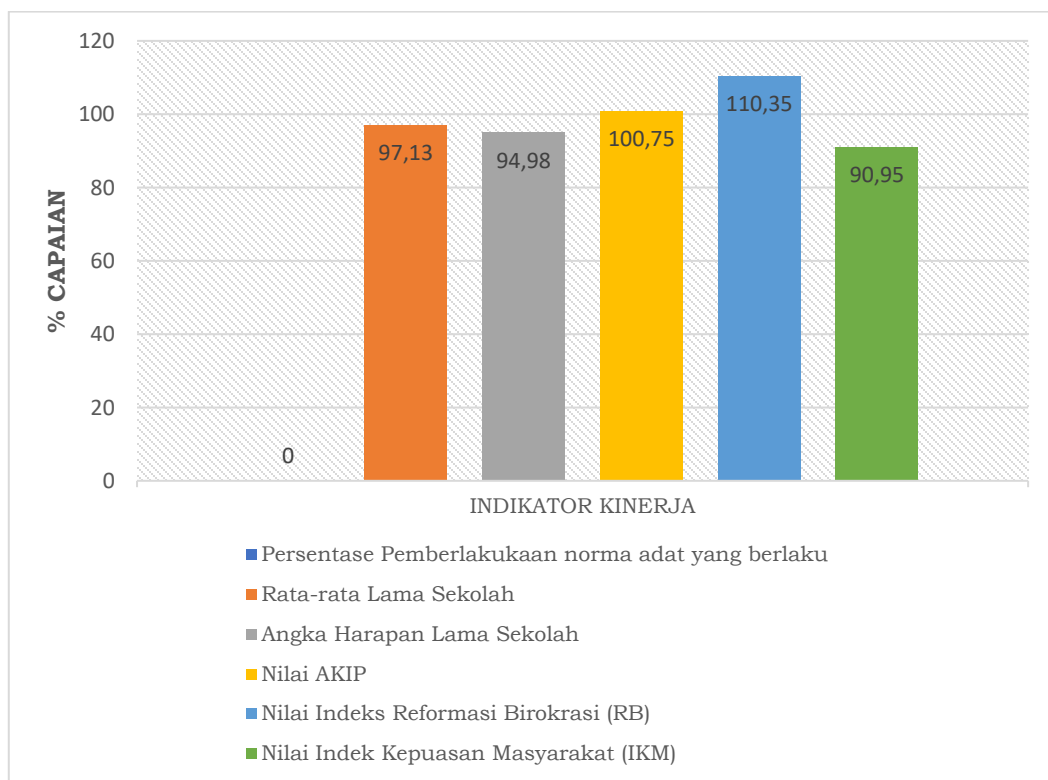
Tabel 2.5
Capaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2025

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indek ABS SBK	Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan	1. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku		2,53	46,83	77,21	89,87	NA	0	0	0	
2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Persentase peningkatan kualitas dan akses pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	13,29	13,4	13,41	13,42	
				2. Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,23	8,3	8,37	8,44	8,07	8,08	8,12	8,13	
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
				2. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17 (CC)	B	B	97	B	B	
				3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	87,98	89,97	91,97	B	B	87,98	80	92,78	

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan dengan indikator Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku, realisasinya sampai tahun 2024 masih 0% dan persentase capaian indikator kinerja 0% (sangat rendah). Capaian indikator ini realisasi 0 karena sampai tahun 2024 Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini disebabkan sampai tahun 2024 kesepakatan untuk substansi Ranperda yang berkaitan dengan adat ini belum ada, sehingga Ranperda yang diusulkan untuk dibahas belum ada.

Rata-rata capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan, dapat dilihat pada grafik dibawah :

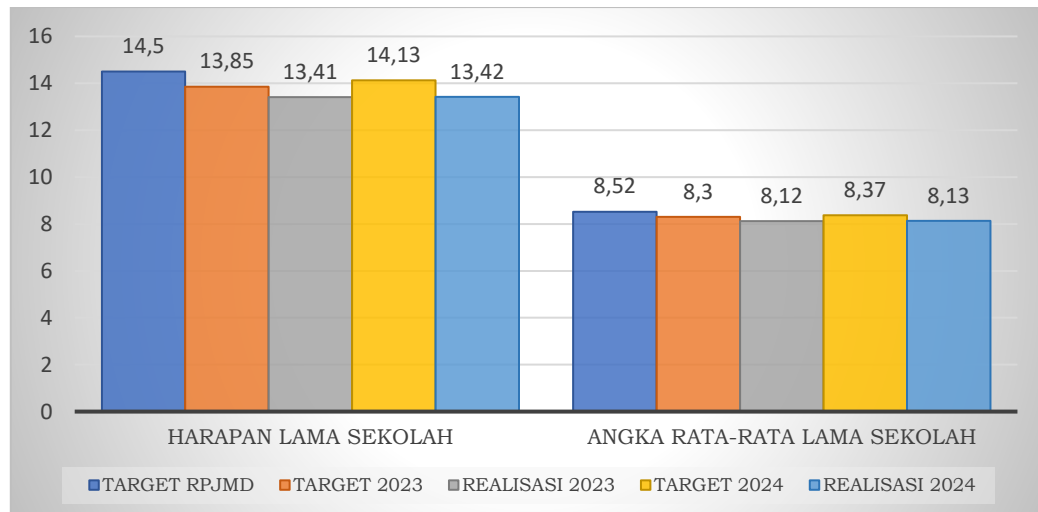
Grafik 2.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024



Untuk sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan dan sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 5 indikator lainnya, realisasi dan capaian kinerja di atas 90 % (sangat tinggi).

Rata-rata capaian indikator untuk sasaran Meningkatnya pengelolaan pendidikan, dapat dilihat pada grafik dibawah :

Grafik 2.2
Realisasi Indikator Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan



Intervensi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah sehingga meningkatkan Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan;
2. Memberikan Dana BOS;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,

Sedangkan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota juga mempunyai Indikator Kinerja Daerah yang merupakan Indikator Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Target Renstra OPD (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)	283	287	295	301	315	279	313	322	319	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)										
2	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	51.19	51.69	52,19	52,69	53,19	32,35	43.35	46,13	39,54	
3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	108.04	108.92	109,80	110,68	111,56	105,52	95.81	97,6	97,48	
4	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/PakeB	85.91	87.54	89,17	90,8	92,43	86,03	92.06	95,52	95,49	
	Angka Partisipasi Murni (APM)										
5	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	99.29	99.46	99,63	99,80	99,97	99,08	87.36	87,93	88,23	
6	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81.68	83.11	84,54	85,97	87,40	81,23	77.78	77,44	84,94	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)										
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99.21	99.3	99,39	99,48	99,57	99,99	86.73	103,3	90,08	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	97.04	97.25	97,46	97,67	97,88	97,19	77.96	91,2	87,23	
	Angka Putus Sekolah										
11	Angka putus sekolah SD/MI	0.002	0.001	0,001	0,001	1	0.01	0.01	0,001	0,04	
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0.01	0.01	0,01	0,01	0,01	0.01	0.01	0,01	0,05	
	Angka Kelulusan										
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Melanjutkan (AM)										
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	95.18	92,04	100	
	Fasilitas Pendidikan										
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1006	1256	1506	1756	2006	850		1490	1751	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	407	432	457	482	507	450		395	477	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	88.85	88.95	88,95	89	89,05	80,52	73.95	76,84	79	
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	25.89	25.89	25,90	25,90	25,91	16.18				
20	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	10.7	10.75	10,80	10,86	10,90	10.96	9.07	9,84	8,73	
21	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah	8.72	8.75	8,77	8,80	8,82	8.93				
22	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.45	0.46	0,47	0,48	0,49	0.60	0.38	1,7	0,57	
23	Rasio guru / murid per kelas rata-rata	1.76	1.79	1,80	1,81	1,82	1.92	1.75			
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43.25	43.75	44,25	44,75	45,25	49.43%	50.81	51,6	61,5	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	87.66	88.41	89,16	89,91	90,66	76.83%	84.27	85,38	88,52	

No	Indikator	Target Renstra OPD (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	46,02	46,12	46,22	46,32	46,42	59,80%	47,25	91,2	79,5	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	2,75	2,8	2,85	2,90	2,95	1,30%		2,28	6,43	
II.	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN										
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	4	5	5	1	1	5	3	
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	95	105	105	110	110	110	110	110	110	
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	68	68	70	70	75	70	70	70	70	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	14	14	20	20	25	-	-	20	20	
5	Terlestarikan cagar budaya	70	75	80	85	90	65	65	85	85	

2.1.3.B. Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan. untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau,

Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mencakup Pendidikan dasar, Pendidikan non formal dan Pendidikan anak usia dini.

Keberhasilan penerapan SPM ini diukur dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu :

A. Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Angka partisipasi sekolah (5-6);
- b) Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B;
- c) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV).

B. Pendidikan Dasar

- 1) SD
 - a) Angka partisipasi sekolah (7-12);
 - b) Kemampuan literasi;
 - c) Kemampuan numerasi;

- d) Indeks iklim keamanan;
- e) Indeks iklim kebhinekaan;
- f) Indeks iklim inklusivitas.

2) SMP

- a) Angka partisipasi sekolah (13-15);
- b) Kemampuan literasi;
- c) Kemampuan numerasi;
- d) Indeks iklim keamanan;
- e) Indeks iklim kebhinekaan;
- f) Indeks iklim inklusivitas.

C. Pendidikan Kesetaraan

- a) Angka partisipasi sekolah.

Penerapan SPM Bidang Pendidikan sejak tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022, sedangkan pada tahun sebelumnya penerapan SPM Bidang Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018. Dimana terdapat perbedaan indikator dalam pencapaian SPM Bidang Pendidikan.

Berbagai upaya dan ikhtiar telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk pemenuhan SPM tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan hal ini tampak dari masih banyak penduduk usi 5-6 tahun, 7-15 tahun dan 7-18 tahun yang belum menikmati layanan Pendidikan yang seharusnya diterima. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan untuk memberi solusi terhadap banyaknya penduduk usia sekolah yang belum menikmati layanan pendidikan.

2.1.4. Kelompok Layanan Sasaran

Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdapat Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawah Kepala Dinas, UPTD ini terdiri dari :

1. Sekolah Dasar Negeri

Jumlah Sekolah Dasar Negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2024 adalah : 374 satuan pendidikan, yang terdiri dari 360 sekolah dasar negeri dan 14 sekolah dasar swasta.

2. Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2024 adalah 62 satuan pendidikan, yang terdiri dari 47 sekolah menengah pertama negeri dan 15 sekolah menengah pertama swasta.

3. PAUD

Dinas Pendidikan melayani satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana jumlah PAUD yang dilayani sampai tahun 2024 adalah 303 satuan pendidikan, dengan rincian :

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK) = 246, (Negeri : 1, Swasta : 245);
- 2) Kelompok Bermain (KB) = 55 (swasta);
- 3) Taman Penitipan Anak (TPA) = 1 (swasta);
- 4) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) = 1 (swasta).

PAUD yang dilayani merupakan milik yayasan, dan 1 buah PAUD Negeri dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Pendidikan Non Formal / Kesetaraan

Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pendidikan Nonformal (PNF) : Pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan non formal (PNF) yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal, seperti pendidikan kesetaraan, keaksaraan, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. SKB berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing daerah.

SKB adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program PNF, seperti pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), pelatihan keterampilan, kursus, dan kegiatan belajar lainnya.

Tugas dan Fungsi SKB:

SKB memiliki tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program PNF yang Disediakan SKB:

Pendidikan Kesetaraan: Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi orang yang tidak sempat bersekolah formal, dengan menyelenggarakan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Pendidikan Keaksaraan: Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan tersebut.

Pelatihan Keterampilan: SKB juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan menjahit, membuat kerajinan tangan, atau pelatihan kerja di bidang tertentu.

Peran SKB dalam Masyarakat:

SKB berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan potensi peserta didik, serta memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat, berdasarkan prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM berfungsi sebagai wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, serta berperan dalam pemberdayaan potensi setempat.

PKBM menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C), kursus keterampilan, pelatihan, dan program pemberdayaan.

PKBM bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

PKBM didirikan atas prakarsa masyarakat, sehingga kegiatan yang diselenggarakan juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

PKBM menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti ekonomi, usia, atau geografis.

PKBM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan keterampilan, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas hidup

Jumlah satuan Pendidikan Non Formal yang dilayani sampai tahun 2024 adalah SKB = 1 (negeri) dan PKBM = 37 (swasta).

5. Sekolah Swasta

Selain dari Sekolah Negeri Dinas pendidikan dan kebudayaan juga melayani Sekolah Swasta. Sekolah swasta yang dilayani mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, sekolah dasar dan sekolah Menengah Pertama.

2.1.5. Mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. DP2KBP3A, bekerja sama dalam upaya penanganan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk perundungan (bullying) antara peserta didik, maupun antara pendidik dan peserta didik. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak kepada seluruh warga sekolah, pendampingan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tiap sekolah, serta penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam mendeteksi dan merespons kasus kekerasan. Selain itu,

kedua dinas menyusun mekanisme pelaporan terintegrasi untuk menangani kasus kekerasan secara cepat dan tepat. Dalam kasus tertentu, DP2KBP3A juga memberikan layanan psikososial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menjadi mitra penting bagi sekolah dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak.

2. DLHPP, bekerja sama untuk menciptakan satuan pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan. Bentuk kemitraan ini antara lain berupa pendampingan teknis terhadap sekolah yang mengikuti program Adiwiyata, pelaksanaan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup bagi guru dan siswa, serta fasilitasi kegiatan seperti pembuatan taman sekolah, pengelolaan sampah terpilah, dan bank sampah sekolah. DLHPP juga memberikan dukungan dalam penilaian dan evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata, sedangkan Dinas Pendidikan berperan dalam pembinaan dan integrasi nilai-nilai pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum pembelajaran. Sinergi ini turut memperkuat karakter peserta didik agar lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
3. Dinas Kesehatan, bersinergi dalam mendukung Gerakan Sekolah Sehat dan Kabupaten Layak Anak. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala, serta edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dilaksanakan bersama melalui kampanye kebersihan, gizi seimbang, dan sanitasi sekolah. Selain itu, Dinas Kesehatan juga turut memastikan tersedianya sarana sanitasi dan air bersih yang layak di sekolah, sebagai bagian dari indikator sekolah sehat dan ramah anak. Kemitraan ini menjadi bagian integral dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai pilar penting dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
4. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMDN), dalam penguatan lembaga PAUD nagari dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.

9. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
10. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
11. Pemerintah Nagari dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
12. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
13. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan mitra mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perencanaan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan dimaksudkan agar pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu menyeimbangkan dengan aspek lingkungan dan aspek pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pendidikan dan kebudayaan maupun pemangku kepentingan pendidikan dimasa datang. Isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun yang akan datang.

Kondisi internal membutuhkan upaya peningkatan mutu sumber daya aparatur yang selalu memiliki semangat kerja cerdas, kerja tuntas, kerja kualitas, kerja ikhlas dan kerja berintegritas dengan semboyan bekerja bersama, bersama bekarja. Ada 7 (Tujuh) permasalahan utama yang menjadi isu strategis yang dapat di intervensi untuk Meningkatkan kualitas dan intelektualitas anak usia sekolah serta akses pendidikan yaitu: (1) Penanganan ATS (Anak

Tidak Sekolah) untuk mendukung capaian APS dan APM sampai 100% (2) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan (Kualifikasi S1, Sertifikasi dan Uji Kompetensi) Guru, (3) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pemerataan pendidikan, (4) Penguatan Kurikulum Muatan Lokal, (5) Pendataan Saranaprasarana Pendidikan sebagai mitigasi dalam menentukan kondisi sekolah yang sudah baik, belum baik dan tidak baik (Rusak berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan), (6) Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (7) Kesenjangan Inovasi pendidikan untuk peningkatan pelayan public yang belum merata.

Adanya Anak Tidak Sekolah untuk mendapatkan penanganan terhadap adanya Akses Pendidikan untuk semua anak usia sekolah untuk bersekolah sesuai dengan jenjang usianya dan harus diupayakan melalui pemerataan kualitas pendidikan baik mutu kelembagaan maupun mutu sumberdaya. Untuk kualitas pendidikan yang kurang optimal dibutuhkan adanya inovasi – inovasi melalui pemenuhan rasio guru dan murid yang ideal serta melakukan upaya pemenuhan SPM Pendidikan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk pendidikan karakter siswa dibutuhkan penyusunan instrumen-instrumen pengukuran terhadap capaian pendidikan karakter terhadap siswa, serta untuk kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dibutuhkan adanya peningkatan pendidikan yang memiliki sertifikat pendidik dalam menjalankan tugas profesinya sedang tenaga kependidikan senantiasa diberikan bekal peningkatan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditugaskan.

Tabel 2.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	lemahnya penegakan hukum, kurangnya dana, tenaga ahli, dan kesadaran masyarakat	Belum adanya optimalisasi Insentif terhadap pelestari warisan budaya	Disebabkan oleh rendahnya prioritas anggaran dan minimnya dukungan swasta. Kekurangan tenaga ahli Berakar pada terbatasnya pendidikan khusus dan kurangnya insentif. Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat muncul akibat minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya warisan budaya.
2.	Belum optimalnya penetapan tradisi sebagai warisan budaya	Belum optimalnya inventarisasi budaya tak benda, seperti: Tradisi, Sejarah dan Lembaga Adat	Kurangnya Sumber Daya Manusia, minimnya pendanaan, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat.	1. Banyak situs cagar budaya yang belum tertangani 2. kurangnya inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah 3. kurangnya pemahaman masyarakat tentang organisasi lembaga adat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah)	pemerataan kualitas pendidikan	Ada 3 penyebab masalah anak tidak sekolah yaitu: (1) Dropout, (2) Lulus Tidak Melanjutkan dan (3) Belum Pernah Bersekolah	Akar masalah penyebab anak tidak sekolah terdiri dari 13 alasan diantaranya: tidak mau sekolah, tidak ada biaya, jarak ruma ke sekolah terlalu jauh, merasa cukup dengan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh, Menikah, Mengalami kekerasan di sekolah, Bekerja, pengaruh lingkungan, sekolah tidak penting, tidak memiliki seragam, tidak punya akte, penyandang disabilitas dan masalah lainnya
4.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan (Kualifikasi S1, sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru,	Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum berkualifikasi pendidikan S1 dan belum memiliki Sertifikat Pendidik	Guru yang belum berkualifikasi S1 dan belum bersertifikat pendidik berada di Jenjang Guru PAUD yang dalam pengangkatannya masih banyak dari kualifikasi SMA sederajat
5.	Penguatan Kurikulum Muatan Lokal,	Satuan Pendidikan belum mengintegrasikan muatan local secara optimal	Keterbatasan panduan, guru yang kurang kompeten, serta anggapan bahwa muatan lokal kurang relevan dengan kebutuhan akademik nasional	Belum meratanya penggunaan Kurikulum muatan lokal dengan pemilihan muatan lokal yang belum memperhatikan kearifan lokal
6.	Pendataan Sarana prasarana Pendidikan	Banyaknya sarana prasarana Pendidikan	Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat menyelesaikan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	Mitigasi data sarana parasana dalam kondisi baik, rusak ringan, sedang dan berat belum teridentifikasi secara keseluruhan sehingga dalam penanganan perbaikan bersifat temporal
7.	Kesenjangan Inovasi pendidikan	Program inovasi tidak menyentuh seluruh satuan pendidikan sebagai tuntutan yang sama.	Implementasi kebijakan yang tidak merata memperbesar jarak antara sekolah yang "maju" dan yang tertinggal.	Akar masalah kesenjangan inovasi pendidikan antara lain ketimpangan infrastruktur, keterbatasan kompetensi guru, dan perbedaan kebijakan yang tidak merata. Selain itu, kesenjangan sosial ekonomi membuat siswa

Dari kajian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Permasalahan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Belum Optimalnya kualitas/mutu pendidikan.

Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,41 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2. Hal ini

mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, Target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,85 tahun, sedangkan realisasi capaiannya adalah 13,41, sehingga tidak tercapai. Selama 5 tahun terakhir, RLS Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 mengalami tren yang positif, karena tidak pernah menurun dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan yang dialami tidak begitu signifikan, rata-rata kenaikannya hanya 0,35 setiap tahunnya. Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2023 sebesar 8,12 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Satuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kemampuan literasi lebih tinggi daripada kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang diukur pada asesmen nasional di rapor pendidikan dimulai sejak tahun 2021. Dilihat dari aplikasi rapor pendidikan, pada tahun 2021-2023 persentase literasi di atas 40% sedangkan persentase numerasi di bawah 40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum cakap pada literasi dan numerasi karena persentasenya di bawah 75%.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu isu strategis dalam sektor pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah belum optimalnya kualitas pendidikan, yang tercermin dari berbagai indikator capaian pembangunan manusia dan pembelajaran peserta didik.

Pada tahun 2023, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 13,41 tahun, masih berada di bawah target RPJMD sebesar 13,85 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas diperkirakan hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Diploma II, sehingga berimplikasi pada rendahnya daya saing sumber daya manusia (SDM) jika dibandingkan dengan daerah lain.

Indikator lain yang menjadi perhatian adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,12 tahun, di bawah standar wajib belajar 9 tahun. Meskipun RLS menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, laju peningkatannya belum signifikan, yaitu rata-rata hanya sekitar 0,35 tahun per tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian pendidikan antara lain yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi, keterbatasan fiskal daerah, akses yang sulit ke satuan pendidikan di daerah terpencil, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama ruang kelas

Selain itu, hasil Asesmen Nasional yang tercermin dalam Rapor Pendidikan (2021–2023) menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik lebih baik dibandingkan numerasi, namun keduanya masih belum mencapai kompetensi minimum (75%). Selama tiga tahun terakhir persentase capaian literasi sekolah berada di atas 40%. Sedangkan numerasi konsisten berada di bawah 40%

Isu strategis lainnya mencakup rendahnya angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun, yang pada tahun 2022 sebesar 72,64%, masih di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Tingginya jumlah anak putus sekolah (APS), khususnya pada jenjang SD (117 anak) dan SMP (189 anak) pada tahun 2022.

Kondisi ini mencerminkan pentingnya intervensi kebijakan secara komprehensif untuk mempercepat pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.8
Perumusan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Belum meratanya kualitas dan akses pendidikan	Belum optimalnya kualitas/mutu pendidikan	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat untuk semua (pendidikan berkualitas)	pemerataan kesempatan pendidikan, pembangunan satuan pendidikan, sistem penerimaan murid baru, rapor pendidikan, tata kelola guru	PENDIDIKAN - signifikan antara kualitas pendidikan di kota dengan di perdesaan - kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan	-Pendidikan berkualitas yang merata -SDM yang berdaya saing dan berkarakter - pendidikan yang inklusif
Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	Perlunya Pemberian Insentif terhadap pemilik cagar budaya untuk mencegah adanya alih fungsi cagar budaya.		Globalisasi budaya (budaya lokal semakin tergerus budaya populer dunia)	Alih fungsi lahan, bencana alam, kurangnya pendanaan dan modernisasi gaya hidup	Keterbatasan SDM dan teknologi, kesadaran masyarakat rendah	- Keterbatasan pendanaan, SDM, teknologi dan konservasi dalam perlindungan budaya - tekanan globalisasi dan modernisasi - Rendahnya kesadaran, apresiasi dan partisipasi masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penyusunan Renstra PD. Tahapan ini tidak hanya menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan tetapi juga sebagai kerangka pengarah agar seluruh langkah pembangunan daerah terencana secara sistematis, terukur, dan tepat sasaran. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perumusan ini menjadi acuan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pendidikan dan kebudayaan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya, maka dirumuskankah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Bab ini memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu "Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

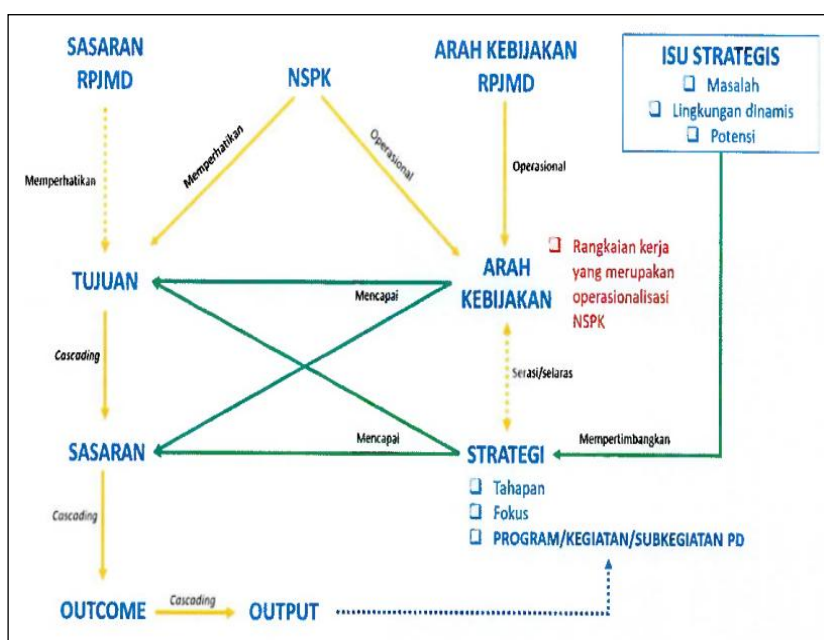
Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh PD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

1. kalimat kondisi;
2. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
4. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

Pada gambar 3.1 di halaman berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra PD

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh PD melalui strategi dan intervensi program.

Alur dimulai dari sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.

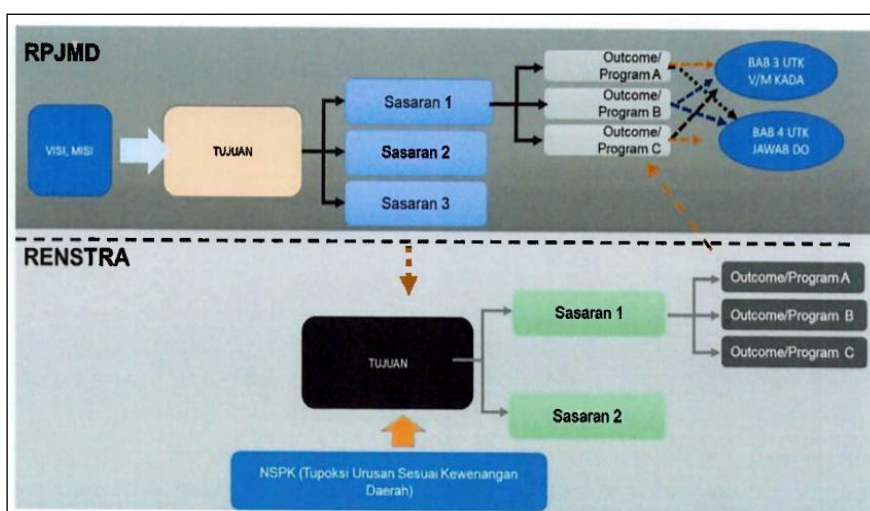
Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan

strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui outcome dan output yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.1 di atas juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat cascading, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat PD.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Kemudian pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan outcome yang akan ditindaklanjuti melalui PD terkait. Outcome dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Sementara itu, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan outcome dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi (sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan outcome), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui misi ke-1 yaitu "Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya" dan misi ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif", memiliki tujuan "Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya".

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

Adapun sasaran yang dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, akses terhadap informasi sejarah, serta pelestarian warisan budaya;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Renstra 2025-2029, beserta target tahunannya dengan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional, dapat dilihat pada tabel 3.1 di halaman berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN												
- Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah - Optimalnya pelestarian cagar budaya	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,13	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52		
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,42	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58		
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100		
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, akses terhadap informasi sejarah, serta pelestarian warisan budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) (Tahun)	8,13	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52		
			Harapan Lama Sekolah (tahun) (Tahun)	13,42	13,46	13,48	13,51	13,53	14,56	14,58		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	72,32	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75		

3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tabel 3.2
Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Visi	:	Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	
Misi 1	:	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	
Tujuan		Sasaran	Strategi
1. Optimalnya pelestarian cagar budaya		1.1. Peningkatan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	1.1.1. Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah 1.1.2. Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya 1.1.3. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya 1.1.4. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian 1.1.5. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal 1.1.6. Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya 1.1.7. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
Misi 3	:	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif	
Tujuan		Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat		1.1 Peningkatan kualitas pendidikan, dan standar hidup masyarakat secara inklusif	1.1.1. Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter 1.1.2. Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.3. Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan Prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.	Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap cagar budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 6. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 7. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 	
2.	Misi 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL)	Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan, Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 3. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikelola oleh Masyarakat 	

Setelah strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel sebelumnya, maka tahapan implementasi dari strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam rentang waktu lima tahunan. Penahapan ini disusun untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan strategi dengan tema pembangunan daerah setiap tahunnya sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis PD.

Penahapan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 di halaman berikut ini

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalnya pelestarian warisan budaya				
Tema : ✓ Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah ✓ Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya ✓ Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata,	Tema : ✓ Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah ✓ Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya ✓ Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata,	Tema : ✓ Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah ✓ Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya ✓ Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata,	Tema : ✓ Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah ✓ Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya ✓ Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata,	Tema : ✓ Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah ✓ Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya ✓ Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata,

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<p>dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal ✓ Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya ✓ Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer 	<p>dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal ✓ Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya ✓ Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer 	<p>dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal ✓ Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya ✓ Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer 	<p>dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal ✓ Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya ✓ Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer 	<p>dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian ✓ Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal ✓ Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya ✓ Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter ✓ Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ✓ Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter ✓ Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ✓ Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter ✓ Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ✓ Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter ✓ Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ✓ Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter ✓ Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ✓ Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan fungsi urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik di bidang Pendidikan Kebudayaan. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hasil penurunan (cascading) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator outcome dan output yang telah ditetapkan dalam Bab III sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja PD yang terukur dan dapat dievaluasi.

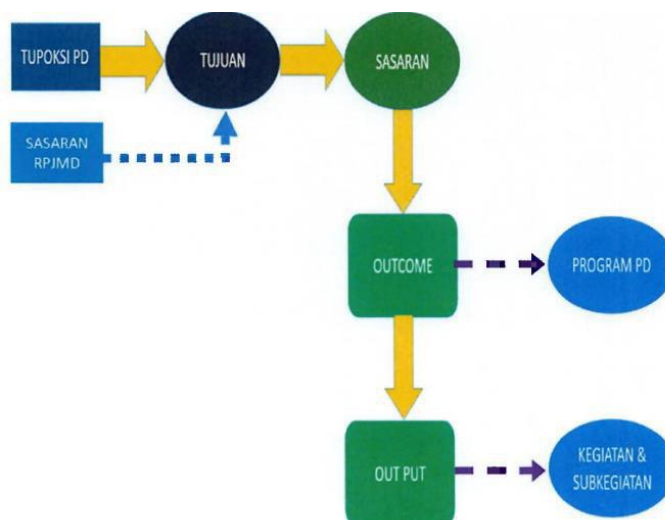
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2030 sekaligus mengarahkan PD dalam merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara terintegrasi. Kesesuaian antara arah kebijakan dengan output kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan korelasi antara indikator kinerja dengan capaian pembangunan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan PD dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD, agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun outcome sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. Outcome ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan output sesuai indikator kinerja. Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan cascading dan result-based planning yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan dari tujuan hingga subkegiatan saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/ subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah.

Berikut ini pada Tabel 4.1 ditampilkan matrik program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2030 pada halaman berikut ini :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>			
- Optimalnya pelestarian cagar budaya - Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)					
					Harapan Lama Sekolah (Tahun)					
					Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)					
					Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)					
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, akses terhadap informasi sejarah, serta pelestarian warisan budaya					Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)			
							Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)			
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
							Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	
				Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
					Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenia tradisional		Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
				Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
				Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan		Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			Meningkatnya atta kelola pengelolaan museum		Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
				Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		
					Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan			Rata-rata Lama Sekolah (tahun) (Tahun)			
					Harapan Lama Sekolah (tahun) (Tahun)			
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah			Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
						Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK	
				Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
					Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
				Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan		Indeks Distribusi Guru (Indeks)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
					Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan		Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Tabel 4.1 di atas memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan tabel ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta peraturan terkait urusan pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra ini secara konsisten mengintegrasikan prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong penguatan inovasi sebagai instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Secara substansi, Tabel 4.1 menekankan tiga sasaran utama yang menjadi fokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: (1) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan, (2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, akses terhadap informasi sejarah, serta pelestarian warisan budaya, serta (3)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga sasaran tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah indikator kinerja, antara lain Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Persentase cagar budaya yang dilestarikan, Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan dan nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai program dan kegiatan dirumuskan, meliputi Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Pendidik, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini mencakup berbagai aspek penunjang, antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Melalui program ini, diharapkan terwujud tata kelola kelembagaan yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel, sehingga pelaksanaan fungsi urusan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan secara optimal.

Dengan adanya pemetaan yang sistematis dalam Tabel 4.1, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman operasional yang menekankan konsistensi, akuntabilitas, dan adaptivitas pembangunan. Hal ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, untuk melengkapi pemetaan program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, disajikan pula Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rencana kebutuhan pendanaannya pada periode tahun 2025–2029 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 di halaman berikut. Matriks ini disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta kemampuan fiskal daerah, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih operasional mengenai kebutuhan pendanaan setiap program. Dengan demikian, Tabel 4.2 berfungsi sebagai instrumen teknis yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran secara konsisten, sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				554.652.810.870,00		608.052.777.516,00		661.723.762.100,00		723.174.348.702,00		792.447.458.112,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				460.572.470.561,00		295.133.144.923,00		296.020.335.294,00		297.038.115.244,00		298.186.119.063,00	
Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	460.572.470.561,00	100	295.133.144.923,00	100	296.020.335.294,00	100	297.038.115.244,00	100	298.186.119.063,00	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.020.000,00		214.730.774,00		214.730.774,00		229.856.042,00		244.177.079,00	
Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	15.020.000,00	2	214.730.774,00	2	214.730.774,00	2	229.856.042,00	2	244.177.079,00	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0		2		2		2				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.660.000,00		50.280.093,00		50.280.093,00		53.733.423,00		54.014.187,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	5.660.000,00	2	50.280.093,00	2	50.280.093,00	2	53.733.423,00	2	54.014.187,00	
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		24.302.875,00		24.302.875,00		26.302.875,00		28.302.875,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	2	24.302.875,00	2	24.302.875,00	2	26.302.875,00	2	28.302.875,00	
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		24.302.875,00		24.302.875,00		26.302.875,00		28.302.875,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	2	24.302.875,00	2	24.302.875,00	2	26.302.875,00	2	28.302.875,00	
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		24.302.875,00		24.302.875,00		26.302.875,00		28.302.875,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	0	0,00	2	24.302.875,00	2	24.302.875,00	2	26.302.875,00	2	28.302.875,00	
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		24.302.875,00		24.302.875,00		26.302.875,00		28.302.875,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	2	24.302.875,00	2	24.302.875,00	2	26.302.875,00	2	28.302.875,00	
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.350.000,00		40.909.027,00		40.909.027,00		42.761.415,00		44.492.402,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	3.350.000,00	1	40.909.027,00	1	40.909.027,00	1	42.761.415,00	1	44.492.402,00	
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.010.000,00		26.330.154,00		26.330.154,00		28.149.704,00		32.458.990,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	6.010.000,00	1	26.330.154,00	1	26.330.154,00	1	28.149.704,00	1	32.458.990,00	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				459.816.083.713,00		288.982.877.491,00		289.279.154.180,00		289.594.406.749,00		290.040.095.143,00	
Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	459.816.083.713,00	1	288.982.877.491,00	1	289.279.154.180,00	1	289.594.406.749,00	1	290.040.095.143,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.300	4.300		4.300		4.320		4.380		4.400		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				459.810.099.713,00		288.916.608.843,00		289.206.931.480,00		289.515.361.306,00		289.954.352.157,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.300	4.300	459.810.099.713,00	4.300	288.916.608.843,00	4.320	289.206.931.480,00	4.380	289.515.361.306,00	4.400	289.954.352.157,00	
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.984.000,00		39.824.622,00		43.694.755,00		48.129.538,00		53.132.941,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	5.984.000,00	1	39.824.622,00	1	43.694.755,00	1	48.129.538,00	1	53.132.941,00	
1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		26.444.026,00		28.527.945,00		30.915.905,00		32.610.045,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0,00	1	26.444.026,00	1	28.527.945,00	1	30.915.905,00	1	32.610.045,00	
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.350.000,00		212.313.336,00		212.313.336,00		222.313.336,00		223.345.224,00	
Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	16.350.000,00	1	212.313.336,00	1	212.313.336,00	1	222.313.336,00	1	223.345.224,00	
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				16.350.000,00		212.313.336,00		212.313.336,00		222.313.336,00		223.345.224,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	16.350.000,00	1	212.313.336,00	1	212.313.336,00	1	222.313.336,00	1	223.345.224,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				115.989.000,00		692.983.133,00		1.149.091.300,00		1.331.681.924,00		1.451.407.524,00		
Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	115.989.000,00	100	692.983.133,00	150	1.149.091.300,00	170	1.331.681.924,00	200	1.451.407.524,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		10		20		20					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		30		35		40		45			
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000,00		307.788.028,00		407.788.028,00		515.140.350,00		549.980.735,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	50.000.000,00	10	307.788.028,00	20	407.788.028,00	20	515.140.350,00	20	549.980.735,00		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		256.744.921,00		281.695.243,00		310.285.798,00		342.542.179,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	30	256.744.921,00	35	281.695.243,00	40	310.285.798,00	45	342.542.179,00		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65.989.000,00		128.450.184,00		459.608.029,00		506.255.776,00		558.884.610,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	100	65.989.000,00	100	128.450.184,00	150	459.608.029,00	170	506.255.776,00	200	558.884.610,00	
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				174.416.778,00		1.737.135.209,00		1.862.941.595,00		2.145.602.940,00		2.451.588.702,00	
Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	174.416.778,00	1	1.737.135.209,00	1	1.862.941.595,00	1	2.145.602.940,00	1	2.451.588.702,00	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		12		12		12		12		
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.814.978,00		122.846.139,00		122.846.139,00		138.846.139,00		142.615.366,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	8.814.978,00	1	122.846.139,00	1	122.846.139,00	1	138.846.139,00	1	142.615.366,00	
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				130.652.200,00		660.470.784,00		660.470.784,00		727.505.022,00		803.134.264,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	130.652.200,00	12	660.470.784,00	12	660.470.784,00	12	727.505.022,00	12	803.134.264,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		440.313.855,00		440.313.855,00		485.003.347,00		535.422.842,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	12	440.313.855,00	12	440.313.855,00	12	485.003.347,00	12	535.422.842,00	
1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0,00		424.169.456,00		424.169.456,00		434.169.456,00		446.185.701,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	424.169.456,00	1	424.169.456,00	1	434.169.456,00	1	446.185.701,00	
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34.949.600,00		89.334.975,00		215.141.361,00		360.078.976,00		524.230.529,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	34.949.600,00	1	89.334.975,00	1	215.141.361,00	1	360.078.976,00	1	524.230.529,00	
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		1.531.276.081,00		1.531.276.081,00		1.557.757.431,00		1.602.538.436,00	
Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	1.531.276.081,00	1	1.531.276.081,00	1	1.557.757.431,00	1	1.602.538.436,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		4				4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		5		5		5		5		
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		450.897.367,00		450.897.367,00		457.442.235,00		464.814.347,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	450.897.367,00	1	450.897.367,00	1	457.442.235,00	1	464.814.347,00	
1.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		230.243.202,00		230.243.202,00		232.553.627,00		234.981.308,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	5	230.243.202,00	5	230.243.202,00	5	232.553.627,00	5	234.981.308,00	
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		85.315.690,00		85.315.690,00		86.831.475,00		87.523.048,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	4	85.315.690,00	4	85.315.690,00	4	86.831.475,00	4	87.523.048,00	
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		152.943.578,00		152.943.578,00		155.590.757,00		158.370.295,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	152.943.578,00	2	152.943.578,00	2	155.590.757,00	2	158.370.295,00	
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		122.432.025,00		122.432.025,00		128.553.627,00		134.981.308,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	122.432.025,00	1	122.432.025,00	1	128.553.627,00	1	134.981.308,00	
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		170.315.690,00		170.315.690,00		173.831.475,00		177.523.048,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	170.315.690,00	1	170.315.690,00	1	173.831.475,00	1	177.523.048,00	
1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		319.128.529,00		319.128.529,00		322.954.235,00		344.345.082,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	319.128.529,00	1	319.128.529,00	1	322.954.235,00	1	344.345.082,00	
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				191.608.610,00		377.876.174,00		386.875.303,00		458.212.543,00		545.683.997,00	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	191.608.610,00	1	377.876.174,00	1	386.875.303,00	1	458.212.543,00	1	545.683.997,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1		
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000,00		6.390.271,00		15.389.400,00		25.757.017,00		37.499.036,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	2.500.000,00	1	6.390.271,00	1	15.389.400,00	1	25.757.017,00	1	37.499.036,00	
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				86.991.110,00		87.315.690,00		87.315.690,00		87.831.475,00		88.523.048,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1	86.991.110,00	1	87.315.690,00	1	87.315.690,00	1	87.831.475,00	1	88.523.048,00	
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		52.943.578,00		52.943.578,00		55.590.757,00		58.370.295,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0,00	1	52.943.578,00	1	52.943.578,00	1	55.590.757,00	1	58.370.295,00	
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				102.117.500,00		231.226.635,00		231.226.635,00		289.033.294,00		361.291.618,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	102.117.500,00	1	231.226.635,00	1	231.226.635,00	1	289.033.294,00	1	361.291.618,00	
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				243.002.460,00		1.383.952.725,00		1.383.952.725,00		1.498.284.279,00		1.627.282.958,00	
Terperuhnya Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	1	243.002.460,00	5	1.383.952.725,00	5	1.383.952.725,00	5	1.498.284.279,00	5	1.627.282.958,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	1		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	1		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.189.960,00		132.432.025,00		132.432.025,00		138.553.627,00		144.981.308,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	1	39.189.960,00	5	132.432.025,00	5	132.432.025,00	5	138.553.627,00	5	144.981.308,00	
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				154.456.700,00		259.922.314,00		259.922.314,00		311.906.777,00		374.288.133,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	1	154.456.700,00	10	259.922.314,00	10	259.922.314,00	10	311.906.777,00	10	374.288.133,00	
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				39.084.800,00		413.864.155,00		413.864.155,00		442.591.403,00		474.370.756,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	1	39.084.800,00	2	413.864.155,00	2	413.864.155,00	2	442.591.403,00	2	474.370.756,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.271.000,00		108.758.359,00		108.758.359,00		116.307.523,00		124.658.743,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	10.271.000,00	1	108.758.359,00	1	108.758.359,00	1	116.307.523,00	1	124.658.743,00	
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		277.961.586,00		277.961.586,00		290.314.303,00		303.979.425,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	277.961.586,00	1	277.961.586,00	1	290.314.303,00	1	303.979.425,00	
1.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		104.796.022,00		104.796.022,00		107.796.022,00		109.105.273,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	104.796.022,00	1	104.796.022,00	1	107.796.022,00	1	109.105.273,00	
1.01.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0,00		86.218.264,00		86.218.264,00		90.814.624,00		95.899.320,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	0,00	2	86.218.264,00	2	86.218.264,00	2	90.814.624,00	2	95.899.320,00	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				94.050.558.309,00		312.591.110.590,00		364.912.262.190,00		424.812.072.717,00		492.333.524.509,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	61,46	70,82	94.050.558.309,00	75,49	312.591.110.590,00	80,17	364.912.262.190,00	84,85	424.812.072.717,00	89,53	492.333.524.509,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase anak usia usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	96,06	97,5		98		98,5		99		100		
	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar (%)	88,52	89,33		89,73		90,13		90,53		90,94		
	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	79,51	80,67		81,24		81,82		82,4		82,98		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				56.145.760.707,00		161.826.371.808,00		180.353.455.220,00		201.728.235.050,00		222.832.854.296,00	
Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10	0	56.145.760.707,00	10	161.826.371.808,00	10	180.353.455.220,00	10	201.728.235.050,00	10	222.832.854.296,00	
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	0	0		0		378		379		380		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	373		377		378		379		380		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	370	373		377		378		379		380		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0	373		377		378		379		380		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	360	373		377		378		379		380		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	30	39		39		39		39		39		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		5		5		5		5		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		15		15		15		15		
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	17	7		7		7		7		7		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3	25		25		25		25		25		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	360	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3		3		3		3		3		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	0		0		2		2		2		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		5		5		5		5		
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	373		377		378		379		380		
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0		5		5		5		5		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.050	450		450		450		450		450		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	90	1		13		13		13		13		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0		3		3		4		5		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	0		7		7		7		7		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5			5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	100		500		500		500		500		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0		377		378		379		380		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	4		4		4		4		4		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	7	8		8		8		8		8		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	35		35		35		35		35		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		5.517.837.721,00		5.767.837.721,00		7.052.494.966,00		8.405.704.954,00	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0,00	15	5.517.837.721,00	15	5.767.837.721,00	15	7.052.494.966,00	15	8.405.704.954,00	
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		7.183.643.049,00		7.662.309.412,00		8.439.992.678,00		9.317.389.023,00	
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	0	0,00	7	7.183.643.049,00	7	7.662.309.412,00	7	8.439.992.678,00	7	9.317.389.023,00	
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				3.410.400.000,00		12.553.513.165,00		13.103.513.165,00		13.957.484.901,00		14.317.114.862,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	30	39	3.410.400.000,00	39	12.553.513.165,00	39	13.103.513.165,00	39	13.957.484.901,00	39	14.317.114.862,00	
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				210.975.000,00		5.160.119.183,00		5.370.038.306,00		6.610.584.470,00		3.181.973.007,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	4	210.975.000,00	4	5.160.119.183,00	4	5.370.038.306,00	4	6.610.584.470,00	4	3.181.973.007,00	
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		3.841.003.677,00		4.214.270.176,00		5.641.995.973,00		6.124.563.962,00	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	5	3.841.003.677,00	5	4.214.270.176,00	5	5.641.995.973,00	5	6.124.563.962,00	
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		4.888.550.134,00		5.363.616.588,00		5.907.994.875,00		6.522.172.316,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0,00	5	4.888.550.134,00	5	5.363.616.588,00	5	5.907.994.875,00	5	6.522.172.316,00	
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				2.160.000.000,00		10.531.676.421,00		11.006.548.891,00		13.823.654.508,00		15.383.993.297,00	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	5	5	2.160.000.000,00	5	10.531.676.421,00	5	11.006.548.891,00	5	13.823.654.508,00	5	15.383.993.297,00	
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				0,00		3.538.510.200,00		3.882.380.560,00		4.276.421.343,00		5.120.985.289,00	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	3	3.538.510.200,00	3	3.882.380.560,00	4	4.276.421.343,00	5	5.120.985.289,00	
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				421.870.000,00		421.870.000,00		1.296.930.615,00		2.446.445.104,00		4.027.887.395,00	
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100	373	421.870.000,00	377	421.870.000,00	378	1.296.930.615,00	379	2.446.445.104,00	380	4.027.887.395,00	
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				246.131.600,00		249.139.140,00		715.127.142,00		835.846.322,00		1.091.879.131,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	90	1	246.131.600,00	13	249.139.140,00	13	715.127.142,00	13	835.846.322,00	13	1.091.879.131,00	
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				701.271.281,00		702.525.590,00		816.857.940,00		982.506.252,00		1.451.879.891,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.050	450	701.271.281,00	450	702.525.590,00	450	816.857.940,00	450	982.506.252,00	450	1.451.879.891,00	
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				453.975.000,00		464.805.868,00		2.523.996.714,00		2.780.168.829,00		3.069.186.848,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	0	373	453.975.000,00	377	464.805.868,00	378	2.523.996.714,00	379	2.780.168.829,00	380	3.069.186.848,00	
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				36.807.661.826,00		37.911.891.682,00		39.049.248.433,00		40.220.725.885,00		41.427.347.662,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	370	373	36.807.661.826,00	377	37.911.891.682,00	378	39.049.248.433,00	379	40.220.725.885,00	380	41.427.347.662,00	
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0,00		0,00		795.941.369,00		822.279.561,00		932.509.684,00	
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	378	795.941.369,00	379	822.279.561,00	380	932.509.684,00	
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				1.283.250.000,00		11.638.869.257,00		12.415.696.917,00		13.878.812.756,00		14.529.526.542,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	17	7	1.283.250.000,00	7	11.638.869.257,00	7	12.415.696.917,00	7	13.878.812.756,00	7	14.529.526.542,00	
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				0,00		7.665.502.135,00		8.375.949.054,00		9.327.557.543,00		10.401.179.475,00	
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	5	7.665.502.135,00	5	8.375.949.054,00	5	9.327.557.543,00	5	10.401.179.475,00	
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50.000.000,00		611.937.239,00		761.687.002,00		818.695.217,00		983.012.918,00	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	373	50.000.000,00	377	611.937.239,00	378	761.687.002,00	379	818.695.217,00	380	983.012.918,00	
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				31.500.000,00		572.520.483,00		653.862.811,00		789.777.987,00		930.298.138,00	
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2	31.500.000,00	2	572.520.483,00	2	653.862.811,00	2	789.777.987,00	2	930.298.138,00	
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		551.937.239,00		661.687.002,00		718.695.217,00		983.012.918,00	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0	0,00	377	551.937.239,00	378	661.687.002,00	379	718.695.217,00	380	983.012.918,00	
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				341.305.000,00		342.412.664,00		1.280.991.783,00		2.416.399.474,00		4.819.443.448,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	360	1	341.305.000,00	1	342.412.664,00	1	1.280.991.783,00	1	2.416.399.474,00	1	4.819.443.448,00	
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000,00		67.788.017,00		407.788.017,00		615.140.340,00		849.980.728,00	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	67.788.017,00	1	407.788.017,00	1	615.140.340,00	1	849.980.728,00	
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		350.544.193,00		489.544.193,00		620.544.193,00	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	0	0,00	0	0,00	2	350.544.193,00	2	489.544.193,00	2	620.544.193,00	
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				0,00		2.728.734.083,00		3.323.064.697,00		4.660.337.922,00		6.040.855.683,00	
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0,00	5	2.728.734.083,00	5	3.323.064.697,00	5	4.660.337.922,00	5	6.040.855.683,00	
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50.000.000,00		67.805.432,00		307.788.017,00		415.140.340,00		649.980.728,00	
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3	50.000.000,00	3	67.805.432,00	3	307.788.017,00	3	415.140.340,00	3	649.980.728,00	
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				7.500.000,00		107.788.017,00		827.788.017,00		989.778.801,00		1.207.788.017,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1	7.500.000,00	1	107.788.017,00	1	827.788.017,00	1	989.778.801,00	1	1.207.788.017,00	
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				2.426.670.000,00		11.877.645.770,00		12.912.472.583,00		13.112.869.759,00		14.180.001.404,00	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	7	8	2.426.670.000,00	8	11.877.645.770,00	8	12.912.472.583,00	8	13.112.869.759,00	8	14.180.001.404,00	
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		10.339.674.977,00		11.225.042.684,00		12.054.174.786,00		14.128.082.072,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10	0	0,00	10	10.339.674.977,00	10	11.225.042.684,00	10	12.054.174.786,00	10	14.128.082.072,00	
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				36.900.000,00		791.154.803,00		997.147.556,00		1.260.173.570,00		1.613.485.777,00	
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	360	373	36.900.000,00	377	791.154.803,00	378	997.147.556,00	379	1.260.173.570,00	380	1.613.485.777,00	
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				5.501.160.000,00		16.611.232.655,00		17.139.090.916,00		17.646.037.974,00		18.945.723.479,00	
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	35	5.501.160.000,00	35	16.611.232.655,00	35	17.139.090.916,00	35	17.646.037.974,00	35	18.945.723.479,00	
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				39.000.000,00		303.485.777,00		873.485.777,00		997.485.777,00		1.813.485.777,00	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	100	39.000.000,00	500	303.485.777,00	500	873.485.777,00	500	997.485.777,00	500	1.813.485.777,00	
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik				1.916.191.000,00		4.582.797.430,00		6.270.751.162,00		7.739.017.727,00		9.761.865.678,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3	25	1.916.191.000,00	25	4.582.797.430,00	25	6.270.751.162,00	25	7.739.017.727,00	25	9.761.865.678,00	
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.139.982.174,00		91.403.605.452,00		105.893.149.039,00		124.853.935.028,00		151.094.616.410,00	
Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	0	23.139.982.174,00	0	91.403.605.452,00	2	105.893.149.039,00	2	124.853.935.028,00	2	151.094.616.410,00	
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	0		25		25		25				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	59	1		1		1		1				
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3		3		3		3				
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	0		0		1		1				
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2		2		2		2				
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	0		3		3		3				
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	6		6		6		6				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	51		63		64		65		66		
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0		5		5		5		5		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	220	250		250		250		250		250		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	60	10		10		10		10		10		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0		5		5		5		5		
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	500		100		100		100		100		
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	59	61		63		64		65		66		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0		63		64		65		66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0		5		5		5		5		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	0		5		5		5		5		
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20	14		14		14		14		14		
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0		5		5		5		5		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	0		3		3		3		3		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		5		5		5		5		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	21	14		14		14		14		14		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	11	7		7		7		7		7		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	0	61		63		64		65		66		
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	59	61		63		64		65		66		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	200	100		63		64		65		67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	0		0		64		65		66		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		4.221.643.484,00		4.662.309.412,00		6.439.992.678,00		7.317.389.023,00	
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	0	0,00	3	4.221.643.484,00	3	4.662.309.412,00	3	6.439.992.678,00	3	7.317.389.023,00	
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		4.860.119.183,00		5.260.119.183,00		6.460.119.183,00		7.760.119.183,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0,00	3	4.860.119.183,00	3	5.260.119.183,00	3	6.460.119.183,00	3	7.760.119.183,00	
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				0,00		7.060.119.183,00		7.860.119.183,00		8.260.119.183,00		9.460.119.183,00	
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	0	0,00	5	7.060.119.183,00	5	7.860.119.183,00	5	8.260.119.183,00	5	9.460.119.183,00	
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				765.600.000,00		6.838.783.014,00		7.200.551.381,00		8.273.461.170,00		9.458.293.801,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	21	14	765.600.000,00	14	6.838.783.014,00	14	7.200.551.381,00	14	8.273.461.170,00	14	9.458.293.801,00	
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				1.431.150.000,00		4.432.941.246,00		4.956.928.705,00		5.188.674.843,00		6.029.640.388,00	
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20	14	1.431.150.000,00	14	4.432.941.246,00	14	4.956.928.705,00	14	5.188.674.843,00	14	6.029.640.388,00	
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		2.262.266.131,00		2.946.060.651,00		3.042.080.728,00		4.150.412.318,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	5	2.262.266.131,00	5	2.946.060.651,00	5	3.042.080.728,00	5	4.150.412.318,00	
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		2.866.611.774,00		3.253.970.018,00		4.398.414.478,00		5.486.149.654,00	
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	0	0,00	5	2.866.611.774,00	5	3.253.970.018,00	5	4.398.414.478,00	5	5.486.149.654,00	
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				0,00		2.736.815.340,00		3.032.066.165,00		4.136.815.340,00		5.254.995.256,00	
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	0	0,00	3	2.736.815.340,00	3	3.032.066.165,00	3	4.136.815.340,00	3	5.254.995.256,00	
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				870.000.000,00		9.007.707.971,00		9.773.353.842,00		10.565.296.784,00		11.384.424.774,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	11	7	870.000.000,00	7	9.007.707.971,00	7	9.773.353.842,00	7	10.565.296.784,00	7	11.384.424.774,00	
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				1.988.800.000,00		9.762.815.647,00		10.341.662.209,00		12.609.220.970,00		14.167.521.830,00	
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	6	1.988.800.000,00	6	9.762.815.647,00	6	10.341.662.209,00	6	12.609.220.970,00	6	14.167.521.830,00	
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				7.500.000,00		202.372.741,00		646.168.202,00		837.727.105,00		1.024.972.109,00	
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	500	7.500.000,00	100	202.372.741,00	100	646.168.202,00	100	837.727.105,00	100	1.024.972.109,00	
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				383.260.000,00		439.654.203,00		1.359.256.708,00		2.848.653.734,00		4.748.752.277,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	200	100	383.260.000,00	63	439.654.203,00	64	1.359.256.708,00	65	2.848.653.734,00	67	4.748.752.277,00	
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.037.000,00		35.054.193,00		520.544.193,00		670.544.193,00		720.544.193,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	60	10	28.037.000,00	10	35.054.193,00	10	520.544.193,00	10	670.544.193,00	10	720.544.193,00	
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				246.223.000,00		259.372.741,00		815.689.778,00		936.787.998,00		1.093.250.096,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	220	250	246.223.000,00	250	259.372.741,00	250	815.689.778,00	250	936.787.998,00	250	1.093.250.096,00	
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				224.680.000,00		259.575.400,00		1.023.895.769,00		1.251.636.663,00		1.898.906.105,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	0	61	224.680.000,00	63	259.575.400,00	64	1.023.895.769,00	65	1.251.636.663,00	66	1.898.906.105,00	
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				16.835.418.174,00		17.340.480.719,00		17.860.695.140,00		18.396.515.995,00		18.948.411.474,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	59	61	16.835.418.174,00	63	17.340.480.719,00	64	17.860.695.140,00	65	18.396.515.995,00	66	18.948.411.474,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0,00		0,00		320.544.193,00		420.544.193,00		520.544.193,00	
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	64	320.544.193,00	65	420.544.193,00	66	520.544.193,00	
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30.000.000,00		707.162.343,00		737.012.201,00		871.217.130,00		909.807.750,00	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	51	30.000.000,00	63	707.162.343,00	64	737.012.201,00	65	871.217.130,00	66	909.807.750,00	
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				35.000.000,00		48.356.067,00		393.180.901,00		433.086.652,00		478.109.042,00	
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2	35.000.000,00	2	48.356.067,00	2	393.180.901,00	2	433.086.652,00	2	478.109.042,00	
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0,00		597.026.446,00		645.327.186,00		773.863.901,00		963.119.337,00	
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0	0,00	63	597.026.446,00	64	645.327.186,00	65	773.863.901,00	66	963.119.337,00	
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				225.000.000,00		235.124.447,00		1.085.046.076,00		2.018.131.530,00		3.874.913.276,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	59	1	225.000.000,00	1	235.124.447,00	1	1.085.046.076,00	1	2.018.131.530,00	1	3.874.913.276,00	
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				0,00		0,00		497.026.446,00		545.327.187,00		720.674.968,00	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	497.026.446,00	1	545.327.187,00	1	720.674.968,00	
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				0,00		0,00		280.544.193,00		300.544.193,00		420.544.193,00	
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	0	0,00	0	0,00	2	280.544.193,00	2	300.544.193,00	2	420.544.193,00	
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				32.500.000,00		44.841.221,00		310.062.211,00		464.841.221,00		587.487.473,00	
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3	32.500.000,00	3	44.841.221,00	3	310.062.211,00	3	464.841.221,00	3	587.487.473,00	
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				36.814.000,00		867.504.959,00		987.504.959,00		1.227.504.959,00		1.542.195.810,00	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	59	61	36.814.000,00	63	867.504.959,00	64	987.504.959,00	65	1.227.504.959,00	66	1.542.195.810,00	
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				0,00		6.100.441.180,00		6.790.441.180,00		7.200.441.180,00		9.900.441.180,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	0	0,00	5	6.100.441.180,00	5	6.790.441.180,00	5	7.200.441.180,00	5	9.900.441.180,00	
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0,00		57.788.017,00		857.788.017,00		987.788.017,00		1.007.788.017,00	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	3	57.788.017,00	3	857.788.017,00	3	987.788.017,00	3	1.007.788.017,00	
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		4.199.903.781,00		5.041.445.375,00		6.319.295.288,00		8.632.715.183,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0	0,00	5	4.199.903.781,00	5	5.041.445.375,00	5	6.319.295.288,00	5	8.632.715.183,00	
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0,00		4.830.389.938,00		5.110.770.865,00		6.314.950.610,00		8.591.518.641,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	0	0,00	25	4.830.389.938,00	25	5.110.770.865,00	25	6.314.950.610,00	25	8.591.518.641,00	
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK				0,00		1.128.734.083,00		1.323.064.697,00		2.660.337.922,00		4.040.855.683,00	
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	0	0,00	5	1.128.734.083,00	5	1.323.064.697,00	5	2.660.337.922,00	5	4.040.855.683,00	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				9.017.917.138,00		31.808.273.744,00		41.339.004.281,00		51.656.106.604,00		61.585.892.717,00	
Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0	0	9.017.917.138,00	0	31.808.273.744,00	3	41.339.004.281,00	3	51.656.106.604,00	3	61.585.892.717,00	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	7	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	100		298		299		300		301		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	90		298		299		300		301		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	294	296		298		299		300		301		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150	90		90		90		90		90		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1		3		3		3		3		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	280	65		298		299		300		301		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	8	4		4		4		4		4		
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	6		6		6		6		6		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0		5		5		5		5		
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	0		0		50		50		50		
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5.100	296		298		299		300		301		
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0		0		500		500		500		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1		50		50		50		50		
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1	0		1		1		1		1		
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				109.710.000,00		3.023.292.691,00		3.832.453.620,00		5.357.541.046,00		6.498.666.944,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	8	4	109.710.000,00	4	3.023.292.691,00	4	3.832.453.620,00	4	5.357.541.046,00	4	6.498.666.944,00	
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				150.000.000,00		2.835.811.719,00		3.685.061.007,00		4.856.085.652,00		5.049.038.754,00	
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	7	1	150.000.000,00	1	2.835.811.719,00	1	3.685.061.007,00	1	4.856.085.652,00	1	5.049.038.754,00	
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				0,00		1.835.811.719,00		2.235.811.719,00		3.735.811.719,00		4.735.811.719,00	
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	1	0	0,00	1	1.835.811.719,00	1	2.235.811.719,00	1	3.735.811.719,00	1	4.735.811.719,00	
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				0,00		0,00		399.287.529,00		519.287.529,00		849.287.529,00	
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0,00	0	0,00	500	399.287.529,00	500	519.287.529,00	500	849.287.529,00	
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				0,00		0,00		320.544.193,00		420.544.193,00		520.544.193,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	3	320.544.193,00	3	420.544.193,00	3	520.544.193,00	
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				147.398.138,00		156.765.656,00		907.347.612,00		1.118.614.538,00		1.610.915.257,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	150	90	147.398.138,00	90	156.765.656,00	90	907.347.612,00	90	1.118.614.538,00	90	1.610.915.257,00	
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				49.190.000,00		69.643.856,00		752.587.673,00		888.672.354,00		1.021.948.108,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	0	90	49.190.000,00	298	69.643.856,00	299	752.587.673,00	300	888.672.354,00	301	1.021.948.108,00	
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				5.437.800.000,00		5.600.934.000,00		5.768.962.020,00		5.942.030.880,00		6.120.291.807,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	294	296	5.437.800.000,00	298	5.600.934.000,00	299	5.768.962.020,00	300	5.942.030.880,00	301	6.120.291.807,00	
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				93.490.000,00		88.970.598,00		475.502.034,00		663.209.407,00		802.313.965,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	280	65	93.490.000,00	298	88.970.598,00	299	475.502.034,00	300	663.209.407,00	301	802.313.965,00	
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				29.700.000,00		524.090.720,00		673.642.079,00		767.504.959,00		805.709.673,00	
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	100	29.700.000,00	298	524.090.720,00	299	673.642.079,00	300	767.504.959,00	301	805.709.673,00	
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				38.025.000,00		89.328.270,00		427.162.965,00		470.517.712,00		519.431.324,00	
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	2	38.025.000,00	2	89.328.270,00	2	427.162.965,00	2	470.517.712,00	2	519.431.324,00	
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				44.662.000,00		54.160.924,00		574.928.568,00		760.143.957,00		869.912.785,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	44.662.000,00	1	54.160.924,00	1	574.928.568,00	1	760.143.957,00	1	869.912.785,00	
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				55.125.000,00		67.905.489,00		339.336.288,00		567.942.224,00		826.853.752,00	
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	55.125.000,00	1	67.905.489,00	1	339.336.288,00	1	567.942.224,00	1	826.853.752,00	
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		4.033.893.211,00		4.160.695.056,00		5.523.084.972,00		5.453.503.069,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0,00	5	4.033.893.211,00	5	4.160.695.056,00	5	5.523.084.972,00	5	5.453.503.069,00	
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				593.750.000,00		6.079.254.721,00		6.670.033.154,00		7.347.005.707,00		8.110.778.402,00	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	4	593.750.000,00	4	6.079.254.721,00	4	6.670.033.154,00	4	7.347.005.707,00	4	8.110.778.402,00	
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				0,00		0,00		346.504.959,00		387.504.959,00		537.504.959,00	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	0	0,00	0	0,00	50	346.504.959,00	50	387.504.959,00	50	537.504.959,00	
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				87.900.000,00		96.681.950,00		441.091.334,00		505.616.717,00		818.466.120,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	87.900.000,00	3	96.681.950,00	3	441.091.334,00	3	505.616.717,00	3	818.466.120,00	
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				0,00		945.361.510,00		1.134.410.609,00		1.351.041.826,00		1.595.449.088,00	
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0,00	1	945.361.510,00	1	1.134.410.609,00	1	1.351.041.826,00	1	1.595.449.088,00	
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				109.590.000,00		130.123.947,00		674.609.775,00		829.084.597,00		1.043.807.759,00	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	1	109.590.000,00	50	130.123.947,00	50	674.609.775,00	50	829.084.597,00	50	1.043.807.759,00	
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				1.514.010.000,00		2.788.345.367,00		3.258.721.312,00		4.369.737.081,00		6.251.747.921,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	4	2	1.514.010.000,00	2	2.788.345.367,00	2	3.258.721.312,00	2	4.369.737.081,00	2	6.251.747.921,00	
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				362.527.000,00		366.658.402,00		731.629.329,00		935.045.640,00		1.337.765.268,00	
Terseleenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	5.100	296	362.527.000,00	298	366.658.402,00	299	731.629.329,00	300	935.045.640,00	301	1.337.765.268,00	
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		1.560.619.497,00		1.876.061.949,00		2.330.619.497,00		3.080.619.497,00	
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0,00	2	1.560.619.497,00	2	1.876.061.949,00	2	2.330.619.497,00	2	3.080.619.497,00	
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				195.040.000,00		1.460.619.497,00		1.652.619.497,00		2.009.459.438,00		3.125.524.824,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	6	195.040.000,00	6	1.460.619.497,00	6	1.652.619.497,00	6	2.009.459.438,00	6	3.125.524.824,00	
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.746.898.290,00		27.552.859.586,00		37.326.653.650,00		46.573.796.035,00		56.820.161.086,00	
Meningkatnya Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	0	5.746.898.290,00	0	27.552.859.586,00	20	37.326.653.650,00	20	46.573.796.035,00	20	56.820.161.086,00	
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	0		0		40		41		42		
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	32	38		39		40		41		42		
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	32	38		39		40		41		42		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	38		38		38		38		38		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0		3		3		3		3		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	0		0		3		3		3		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	0		2		2		2		2		
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	900		500		500		500		500		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	120		120		120		120		120		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0		0		5		5		5		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	0		0		13		13		13		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	30		30		30		30		30		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	0		39		40		41		42		
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	0		0		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1	2		2		2		2		2		
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan				15.138.600,00		21.700.159,00		551.700.159,00		701.700.159,00		901.700.159,00	
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	900	15.138.600,00	500	21.700.159,00	500	551.700.159,00	500	701.700.159,00	500	901.700.159,00	
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				0,00		0,00		461.700.159,00		481.700.159,00		501.700.159,00	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	13	461.700.159,00	13	481.700.159,00	13	501.700.159,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				39.960.000,00		42.142.101,00		345.984.183,00		471.700.159,00		689.384.597,00	
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	50	30	39.960.000,00	30	42.142.101,00	30	345.984.183,00	30	471.700.159,00	30	689.384.597,00	
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				167.643.400,00		176.457.989,00		883.262.376,00		974.403.396,00		1.090.052.156,00	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	32	38	167.643.400,00	39	176.457.989,00	40	883.262.376,00	41	974.403.396,00	42	1.090.052.156,00	
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				5.085.700.490,00		5.238.271.504,00		5.395.419.649,00		5.557.282.239,00		5.724.000.706,00	
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	32	38	5.085.700.490,00	39	5.238.271.504,00	40	5.395.419.649,00	41	5.557.282.239,00	42	5.724.000.706,00	
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0,00		0,00		329.996.145,00		389.996.145,00		439.996.145,00	
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	40	329.996.145,00	41	389.996.145,00	42	439.996.145,00	
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)				0,00		511.937.239,00		661.687.002,00		718.695.217,00		983.012.918,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
untuk Pendidikan														
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	0	0,00	39	511.937.239,00	40	661.687.002,00	41	718.695.217,00	42	983.012.918,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				0,00		532.520.483,00		653.862.811,00		789.777.987,00		930.298.138,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	0	0,00	2	532.520.483,00	2	653.862.811,00	2	789.777.987,00	2	930.298.138,00		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				43.788.000,00		59.192.688,00		469.548.433,00		671.139.304,00		856.803.122,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	43.788.000,00	1	59.192.688,00	1	469.548.433,00	1	671.139.304,00	1	856.803.122,00		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				10.000.000,00		33.996.145,00		269.996.145,00		425.396.145,00		549.996.145,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	33.996.145,00	1	269.996.145,00	1	425.396.145,00	1	549.996.145,00		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0,00		0,00		289.548.433,00		309.548.433,00		319.548.433,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	3	289.548.433,00	3	309.548.433,00	3	319.548.433,00	
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				0,00		0,00		211.926.885,00		321.926.885,00		341.926.885,00	
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	0	0,00	0	0,00	20	211.926.885,00	20	321.926.885,00	20	341.926.885,00	
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0,00		0,00		646.350.799,00		870.547.975,00		1.086.668.530,00	
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	5	646.350.799,00	5	870.547.975,00	5	1.086.668.530,00	
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				0,00		4.881.243.328,00		5.724.574.455,00		7.017.706.912,00		9.786.816.722,00	
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	0	0,00	2	4.881.243.328,00	2	5.724.574.455,00	2	7.017.706.912,00	2	9.786.816.722,00	
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				0,00		2.632.497.331,00		3.179.860.140,00		3.807.082.765,00		4.514.726.689,00	
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	2	2.632.497.331,00	2	3.179.860.140,00	2	3.807.082.765,00	2	4.514.726.689,00	
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		2.696.594.848,00		3.096.594.848,00		4.196.594.848,00		5.396.594.848,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0,00	3	2.696.594.848,00	3	3.096.594.848,00	3	4.196.594.848,00	3	5.396.594.848,00	
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas				93.465.000,00		158.906.695,00		775.348.140,00		962.951.837,00		1.301.938.975,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Pendidikan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1	120	93.465.000,00	120	158.906.695,00	120	775.348.140,00	120	962.951.837,00	120	1.301.938.975,00	
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				63.002.800,00		821.042.002,00		887.830.137,00		919.105.676,00		1.126.925.502,00	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	38	63.002.800,00	38	821.042.002,00	38	887.830.137,00	38	919.105.676,00	38	1.126.925.502,00	
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		2.145.017.716,00		2.345.017.716,00		4.785.017.716,00		5.345.017.716,00	
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	2	2.145.017.716,00	2	2.345.017.716,00	2	4.785.017.716,00	2	5.345.017.716,00	
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				0,00		0,00		1.449.105.676,00		1.749.105.676,00		2.049.105.676,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	0	0,00	0	0,00	3	1.449.105.676,00	3	1.749.105.676,00	3	2.049.105.676,00	
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				228.200.000,00		2.804.744.510,00		3.564.744.510,00		4.651.100.511,00		5.718.912.043,00	
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	1	2	228.200.000,00	2	2.804.744.510,00	2	3.564.744.510,00	2	4.651.100.511,00	2	5.718.912.043,00	
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0,00		4.796.594.848,00		5.132.594.849,00		5.801.315.891,00		7.165.034.822,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0	0,00	2	4.796.594.848,00	2	5.132.594.849,00	2	5.801.315.891,00	2	7.165.034.822,00	
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0,00		126.564.603,00		304.799.784,00		510.138.977,00		742.699.362,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	75	0	0,00	80	126.564.603,00	80	304.799.784,00	80	510.138.977,00	80	742.699.362,00	
	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	57	0		100		100		100		100		
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal (%)	75	0		80		80		80		80		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		85.431.108,00		245.739.855,00		444.343.810,00		661.322.070,00	
Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	2	85.431.108,00	2	245.739.855,00	2	444.343.810,00	2	661.322.070,00	
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0		440		442		444		446		
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		43.282.302,00		152.399.893,00		255.069.489,00		371.349.682,00	
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0,00	440	43.282.302,00	442	152.399.893,00	444	255.069.489,00	446	371.349.682,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		42.148.806,00		93.339.962,00		189.274.321,00		289.972.388,00	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	2	42.148.806,00	2	93.339.962,00	2	189.274.321,00	2	289.972.388,00	
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		41.133.495,00		59.059.929,00		65.795.167,00		81.377.292,00	
Terlaksananya penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	2	41.133.495,00	2	59.059.929,00	2	65.795.167,00	2	81.377.292,00	
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0,00		41.133.495,00		59.059.929,00		65.795.167,00		81.377.292,00	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	2	41.133.495,00	2	59.059.929,00	2	65.795.167,00	2	81.377.292,00	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				29.782.000,00		75.392.797,00		181.565.048,00		303.882.787,00		442.415.816,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	52,82	62,75	29.782.000,00	67,61	75.392.797,00	72,46	181.565.048,00	77,31	303.882.787,00	82,17	442.415.816,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks Distribusi Guru (Indeks)	0,61	0,66		0,68		0,70		0,73		0,77		
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				29.782.000,00		75.392.797,00		181.565.048,00		303.882.787,00		442.415.816,00	
Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	0	0	29.782.000,00	1	75.392.797,00	1	181.565.048,00	1	303.882.787,00	1	442.415.816,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	560	1		1		1		1		1		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				29.782.000,00		52.774.957,00		127.095.534,00		212.717.951,00		309.691.071,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	560	1	29.782.000,00	1	52.774.957,00	1	127.095.534,00	1	212.717.951,00	1	309.691.071,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0,00		22.617.840,00		54.469.514,00		91.164.836,00		132.724.745,00	
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	0	0	0,00	1	22.617.840,00	1	54.469.514,00	1	91.164.836,00	1	132.724.745,00	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				0,00		126.564.603,00		304.799.784,00		510.138.977,00		742.699.362,00	
meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui (%)	98	0	0,00	100	126.564.603,00	100	304.799.784,00	100	510.138.977,00	100	742.699.362,00	
	Persentase Usulan izin kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	75	0		100		100		100		100		
	Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui (%)	75	0		100		100		100		100		
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		79.735.701,00		192.023.865,00		321.387.557,00		467.900.599,00	
Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	79.735.701,00	10	192.023.865,00	10	321.387.557,00	10	467.900.599,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		41.766.320,00		100.583.930,00		168.345.863,00		245.090.791,00	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	41.766.320,00	10	100.583.930,00	10	168.345.863,00	10	245.090.791,00	
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		37.969.381,00		91.439.935,00		153.041.694,00		222.809.808,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	37.969.381,00	10	91.439.935,00	10	153.041.694,00	10	222.809.808,00	
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		46.828.902,00		112.775.919,00		188.751.420,00		274.798.763,00	
Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	46.828.902,00	10	112.775.919,00	10	188.751.420,00	10	274.798.763,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		21.515.982,00		51.815.963,00		86.723.626,00		126.258.891,00	
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	21.515.982,00	10	51.815.963,00	10	86.723.626,00	10	126.258.891,00	
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		13.289.283,00		32.003.977,00		53.564.592,00		77.983.433,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	13.289.283,00	10	32.003.977,00	10	53.564.592,00	10	77.983.433,00	
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		12.023.637,00		28.955.979,00		48.463.202,00		70.556.439,00	
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	10	12.023.637,00	10	28.955.979,00	10	48.463.202,00	10	70.556.439,00	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.805.000.000,00		24.468.524.143,00		31.616.629.725,00		39.830.434.306,00		49.107.803.196,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.947.000.000,00		18.557.742.304,00		24.132.835.268,00		30.539.735.109,00		37.776.823.070,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	69	73,35	2.947.000.000,00	79,55	18.557.742.304,00	89,65	24.132.835.268,00	89,75	30.539.735.109,00	89,85	37.776.823.070,00	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				460.000.000,00		4.206.555.992,00		4.570.540.691,00		4.985.551.563,00		5.450.398.905,00	
Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	0	460.000.000,00	1	4.206.555.992,00	1	4.570.540.691,00	1	4.985.551.563,00	1	5.450.398.905,00	
	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	0		60		60		60		60		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60	0		60		60		60		60		
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	8	4		4		4		4		4		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				460.000.000,00		1.561.473.585,00		1.696.584.705,00		1.850.636.741,00		2.023.188.074,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	8	4	460.000.000,00	4	1.561.473.585,00	4	1.696.584.705,00	4	1.850.636.741,00	4	2.023.188.074,00	
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0,00		1.219.059.927,00		1.324.542.693,00		1.444.812.843,00		1.579.525.603,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60	0	0,00	60	1.219.059.927,00	60	1.324.542.693,00	60	1.444.812.843,00	60	1.579.525.603,00	
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				0,00		878.328.891,00		954.328.896,00		1.040.983.166,00		1.138.043.291,00	
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	1	878.328.891,00	1	954.328.896,00	1	1.040.983.166,00	1	1.138.043.291,00	
2.22.02.2.01.0005 - Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan				0,00		547.693.589,00		595.084.397,00		649.118.813,00		709.641.937,00	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	0	0	0,00	60	547.693.589,00	60	595.084.397,00	60	649.118.813,00	60	709.641.937,00	
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.187.000.000,00		7.834.387.755,00		9.956.749.523,00		12.394.925.708,00		15.148.021.478,00	
Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	2	1.187.000.000,00	2	7.834.387.755,00	2	9.956.749.523,00	2	12.394.925.708,00	2	15.148.021.478,00	
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	2		2		2		2		2		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				710.000.000,00		5.741.523.176,00		7.324.853.410,00		7.989.959.358,00		8.734.934.377,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	8	2	710.000.000,00	2	5.741.523.176,00	2	7.324.853.410,00	2	7.989.959.358,00	2	8.734.934.377,00	
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				477.000.000,00		2.092.864.579,00		2.631.896.113,00		4.404.966.350,00		6.413.087.101,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	2	477.000.000,00	2	2.092.864.579,00	2	2.631.896.113,00	2	4.404.966.350,00	2	6.413.087.101,00	
2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00		6.516.798.557,00		9.605.545.054,00		13.159.257.838,00		17.178.402.687,00	
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	0	1.300.000.000,00	2	6.516.798.557,00	4	9.605.545.054,00	6	13.159.257.838,00	8	17.178.402.687,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	4		4		4		4				
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	150	220		220		220		220				
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				0,00		1.612.283.263,00		1.751.790.841,00		1.910.855.664,00		2.089.021.744,00	
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	0	0,00	2	1.612.283.263,00	4	1.751.790.841,00	6	1.910.855.664,00	8	2.089.021.744,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.02.2.03.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				800.000.000,00		1.651.189.444,00		4.600.428.363,00		7.699.670.225,00		11.209.769.132,00	
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	150	220	800.000.000,00	220	1.651.189.444,00	220	4.600.428.363,00	220	7.699.670.225,00	220	11.209.769.132,00	
2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				500.000.000,00		3.253.325.850,00		3.253.325.850,00		3.548.731.949,00		3.879.611.811,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	1	4	500.000.000,00	4	3.253.325.850,00	4	3.253.325.850,00	4	3.548.731.949,00	4	3.879.611.811,00	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				300.000.000,00		803.139.266,00		1.934.163.805,00		3.237.181.907,00		4.712.937.146,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	59,3	69,59	300.000.000,00	79,85	803.139.266,00	80,3	1.934.163.805,00	90,38	3.237.181.907,00	90,45	4.712.937.146,00	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		803.139.266,00		1.934.163.805,00		3.237.181.907,00		4.712.937.146,00	
Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Meningkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40	7	300.000.000,00	7	803.139.266,00	7	1.934.163.805,00	7	3.237.181.907,00	7	4.712.937.146,00	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	0		13		13		13				
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian				0,00		253.483.488,00		675.416.701,00		1.300.422.414,00		2.028.426.209,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tradisional													
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	0	0	0,00	13	253.483.488,00	13	675.416.701,00	13	1.300.422.414,00	13	2.028.426.209,00	
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				300.000.000,00		549.655.778,00		1.258.747.104,00		1.936.759.493,00		2.684.510.937,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	40	7	300.000.000,00	7	549.655.778,00	7	1.258.747.104,00	7	1.936.759.493,00	7	2.684.510.937,00	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0,00		506.966.975,00		550.833.403,00		600.844.827,00		656.852.417,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal (%)	50,65	0	0,00	65,65	506.966.975,00	70,65	550.833.403,00	75,65	600.844.827,00	80,65	656.852.417,00	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		506.966.975,00		550.833.403,00		600.844.827,00		656.852.417,00	
Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	0	0,00	13	506.966.975,00	13	550.833.403,00	13	600.844.827,00	13	656.852.417,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0		2		2		2		2		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal				0,00		253.483.488,00		275.416.701,00		300.422.414,00		328.426.209,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kabupaten/Kota													
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	0	0,00	13	253.483.488,00	13	275.416.701,00	13	300.422.414,00	13	328.426.209,00	
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0,00		136.881.083,00		148.725.019,00		162.228.103,00		177.350.152,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	0	0,00	1	136.881.083,00	1	148.725.019,00	1	162.228.103,00	1	177.350.152,00	
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				0,00		116.602.404,00		126.691.683,00		138.194.310,00		151.076.056,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	2	116.602.404,00	2	126.691.683,00	2	138.194.310,00	2	151.076.056,00	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				444.000.000,00		3.540.617.593,00		3.847.045.053,00		4.196.288.492,00		4.587.650.503,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	444.000.000,00	100	3.540.617.593,00	100	3.847.045.053,00	100	4.196.288.492,00	100	4.587.650.503,00	
	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)	100	100		100		100		100		100		
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				202.000.000,00		1.243.804.608,00		1.550.232.068,00		1.690.965.636,00		1.848.671.598,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	110	15	202.000.000,00	5	1.243.804.608,00	5	1.550.232.068,00	5	1.690.965.636,00	5	1.848.671.598,00	
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	0		4		4		4		4		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	20	20		5		5		5		5		
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				15.000.000,00		115.116.244,00		115.116.244,00		125.566.756,00		137.277.595,00	
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	20	20	15.000.000,00	5	115.116.244,00	5	115.116.244,00	5	125.566.756,00	5	137.277.595,00	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				187.000.000,00		1.018.932.236,00		1.018.932.236,00		1.111.433.205,00		1.215.089.743,00	
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	110	15	187.000.000,00	5	1.018.932.236,00	5	1.018.932.236,00	5	1.111.433.205,00	5	1.215.089.743,00	
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				0,00		109.756.128,00		416.183.588,00		453.965.675,00		496.304.260,00	
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	0	0,00	4	109.756.128,00	4	416.183.588,00	4	453.965.675,00	4	496.304.260,00	
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				242.000.000,00		2.296.812.985,00		2.296.812.985,00		2.505.322.856,00		2.738.978.905,00	
Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	0	242.000.000,00	11	2.296.812.985,00	16	2.296.812.985,00	21	2.505.322.856,00	26	2.738.978.905,00	
	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	0		13		18		23		26		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	20		11		16		21		26		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1	2		11		16		21		26		
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				31.000.000,00		237.906.901,00		237.906.901,00		259.504.627,00		283.707.027,00	
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	20	31.000.000,00	11	237.906.901,00	16	237.906.901,00	21	259.504.627,00	26	283.707.027,00	
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				0,00		630.574.433,00		630.574.433,00		730.574.433,00		830.574.433,00	
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	0	0,00	11	630.574.433,00	16	630.574.433,00	21	730.574.433,00	26	830.574.433,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				211.000.000,00		1.141.791.608,00		1.137.791.608,00		1.208.126.545,00		1.256.099.088,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1	2	211.000.000,00	11	1.141.791.608,00	16	1.137.791.608,00	21	1.208.126.545,00	26	1.256.099.088,00	
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				0,00		286.540.043,00		290.540.043,00		307.117.251,00		368.598.357,00	
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	0	0,00	13	286.540.043,00	18	290.540.043,00	23	307.117.251,00	26	368.598.357,00	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				114.000.000,00		1.060.058.005,00		1.151.752.196,00		1.256.383.971,00		1.373.540.060,00	
Meningkatnya atta kelola pengelolaan museum	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	60,2	69,25	114.000.000,00	75,35	1.060.058.005,00	80,5	1.151.752.196,00	85,2	1.256.383.971,00	88,75	1.373.540.060,00	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				114.000.000,00		1.060.058.005,00		1.151.752.196,00		1.256.383.971,00		1.373.540.060,00	
Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	0	0	114.000.000,00	1	1.060.058.005,00	1	1.151.752.196,00	1	1.256.383.971,00	1	1.373.540.060,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	30	40		40		40		40		40		
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				114.000.000,00		283.212.763,00		303.385.485,00		326.404.476,00		352.178.815,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	30	40	114.000.000,00	40	283.212.763,00	40	303.385.485,00	40	326.404.476,00	40	352.178.815,00	
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				0,00		233.212.761,00		253.385.483,00		276.404.473,00		302.178.813,00	
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	0	0	0,00	1	233.212.761,00	1	253.385.483,00	1	276.404.473,00	1	302.178.813,00	
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				0,00		246.816.241,00		272.490.614,00		301.787.511,00		334.591.216,00	
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0	0	0,00	1	246.816.241,00	1	272.490.614,00	1	301.787.511,00	1	334.591.216,00	
2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				0,00		190.810.440,00		207.315.395,00		226.149.114,00		247.237.210,00	
Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	0	0	0,00	1	190.810.440,00	1	207.315.395,00	1	226.149.114,00	1	247.237.210,00	
2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum				0,00		106.005.800,00		115.175.219,00		125.638.397,00		137.354.006,00	
Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	0	0	0,00	1	106.005.800,00	1	115.175.219,00	1	125.638.397,00	1	137.354.006,00	

Sebagai Perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam urusan bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota secara konsisten mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dukungan ini diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan subkegiatan prioritas yang sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam kaitannya dengan kontribusi terhadap program prioritas daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh termasuk ke dalam sepuluh program prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2025–2029, yaitu program prioritas pada misi ketiga “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Andal, Sehat, Produktif dan Kompetitif, yang mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup Masyarakat secara Inklusif dengan Sasaran Meningkatnya Intelegualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah dengan outcome Meningkatnya Jumlah Anak Sekolah yang Tertangani dan Penduduk Usia 24 tahun keatas yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Program Prioritasnya adalah “Penguatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut diperlukan pelaksanaan subkegiatan sebagaimana daftar table di bawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung dalam pencapaian misi ke-1 yaitu " Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya " dengan tujuan Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat dan sasaran yang akan dicapai Optimalnya pelestarian warisan budaya dan misi ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif" dengan tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif dan sasaran yang akan di capai Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah.

Merujuk pada hal tersebut, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya". Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut secara terukur dan terarah, diperlukan indikator kinerja utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Indikator ini berfungsi memberikan gambaran mengenai tingkat capaian hasil (*outcome*) yang ingin diraih, sekaligus memastikan bahwa peran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangannya dapat dinilai secara objektif.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangannya dalam pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi

mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4 di halaman berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,13	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52	
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,42	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58	
3.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,32	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya juga disusun Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat dua urusan yang diampu, yaitu Urusan Pendidikan serta Kebudayaan. IKK harus mencerminkan keluaran (output) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan. Merujuk kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun Indikator Kinerja Kunci beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	positif	%	79,51	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98	
2.	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	positif	%	61,46	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53	
3.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	positif	%	88,52	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	
4.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	96,06	97	97,5	98	98,5	99	100	
5.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	positif	%	52,82	57,9	62,75	67,61	72,46	77,31	82,17	
6.	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	positif	%	75	0	0	80	80	80	80	
7.	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	positif	%	57	0	0	100	100	100	100	
8.	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	positif	%	75	0	0	80	80	80	80	
9.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	positif	%	75	0	0	100	100	100	100	
10.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	positif	%	98	0	0	100	100	100	100	
11.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	positif	%	75	0	0	100	100	100	100	
12.	Indeks Distribusi Guru	positif	Indeks	0,61	0,64	0,66	0,68	0,70	0,73	0,77	
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
13.	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	positif	%	59,3	65,35	69,59	79,85	80,3	90,38	90,45	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
14.	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	positif	%	60,2	65,15	69,25	75,35	80,5	85,2	88,75	
15.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	positif	%	69	70,15	73,35	79,55	89,65	89,75	89,85	
18.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	positif	%	50,65	0	0	65,65	70,65	75,65	80,65	

Adapun Indikator Kinerja lainnya beserta target capaian untuk periode tahun 2025–2029 ditampilkan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Angka partisipasi sekolah (5-6)	positif	%	69,28	72,46	75,5	78,54	81,58	84,55	87,52	
2.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	positif	%	76,79	77,2	77,61	78,02	78,43	78,84	79,52	
3.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	positif	%	82,37	74,84	75,59	76,34	77,09	77,84	78,59	
4.	Angka partisipasi sekolah (7-12)	positif	%	99,41	99,49	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	
5.	Kemampuan literasi SD	positif	Nilai	63,13	65,63	68,13	70,63	73,13	75,63	78,13	
6.	Kemampuan numerasi SD	positif	Nilai	55,56	58,46	61,36	64,26	67,16	70,06	72,96	
7.	Indeks iklim keamanan SD	positif	Nilai	76,25	77,15	78,05	78,95	79,85	80,75	81,65	
8.	Indeks iklim kebhinekaan SD	positif	Nilai	72	73	74	75	76	77	78	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
9.	Indeks iklim inklusivitas SD	positif	Nilai	58,39	60,89	63,39	65,89	68,39	70,89	73,39	
10.	Angka partisipasi sekolah (13-15)	positif	%	99,28	99,39	99,49	99,59	99,69	99,8	99,9	
11.	Kemampuan literasi SMP	positif	Nilai	70,04	71,14	72,24	73,34	74,44	75,54	76,64	
12.	Kemampuan numerasi SMP	positif	Nilai	61,88	63,38	64,88	66,38	67,88	69,38	70,88	
13.	Indeks iklim keamanan SMP	positif	Nilai	68,74	70,24	71,74	73,24	74,74	76,24	77,74	
14.	Indeks iklim kebhinekaan SMP	positif	Nilai	69,11	70,11	71,11	72,11	73,11	74,11	75,11	
15.	Indeks iklim inklusivitas SMP	positif	Nilai	55,15	57,55	59,95	62,35	64,75	67,15	69,55	
16.	Angka partisipasi sekolah (7-18) kesetaraan	positif	%	36,85	37,89	38,94	39,98	41,02	42,06	43,1	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan, (2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, akses terhadap informasi sejarah, serta pelestarian warisan budaya, serta (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi

untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah serta Optimalisasi pelestarian warisan budaya	Indikator 1 : Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Indikator 2 : Harapan Lama Sekolah (Tahun) Indikator 3 : Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%) Indikator 4 : Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%)				$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52	BPS
						$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
						$\frac{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
			Kepala Dinas	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator 1 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hasil evaluasi dari Inspektorat	Nilai	72,50	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	Sekretariat
			Sekretaris	Sasaran 1 : Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator 1 : Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan = Dimensi Proses + Dimensi Isi Dokumen + Dimensi Tindak Lanjut A. Dimensi Proses (26%) 1. Pelaksanaan Forum PD/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Melaksanakan = 100 - Tidak Melaksanakan = 0 2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Forum PD/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Tepat Waktu = 100 - Tidak Tepat Waktu = 0 B. Dimensi Isi Dokumen (32,70%) 1. Keselarasan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara RRPD dengan RPJMD $\frac{\text{Jumlah Program RRPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$ 2. Keselarasan Kegiatan antara Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Kegiatan pada Renstra}} \times 100\%$ 3. Keselarasan Subkegiatan antara Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan $\frac{\text{Jumlah Subkegiatan Renja yang sesuai dengan Renstra}}{\text{Jumlah Subkegiatan pada Renstra}} \times 100\%$ C. Dimensi Tindak Lanjut (41,30%) 1. Persentase Prioritas Pembangunan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Anggaran Prioritas dalam Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	70	72	74	76	78	80	Sekretariat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						<p>Jumlah Program Prioritas dalam Renja yang menjadi Prioritas Pendanaan dalam APBD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Program Prioritas Pembangunan pada Renja</p> <p>2. Persentase capaian IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Jumlah IKU Kepala Daerah yang mencapai target $\times 100\%$</p> <p>Jumlah IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>3. Persentase capaian IKD RPJMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Jumlah IKD yang mencapai target $\times 100\%$</p> <p>Jumlah IKD RPJMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>								
					Indikator 2 : Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$IP = \sum P_i = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$	Nilai	75	78	80	83	85	87	Sekretariat (Per-BKN No. 8 Tahun 2019)
					Indikator 3 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	77,5	78	78,5	79	79,5	80	Sekretariat
		Kasubag. Umum dan Kepegawaian		Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Indikator 1: Persentase ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkinerja Baik	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Kinerja Baik}}{\text{Jumlah ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Indikator 2: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Keadaan Baik	$\frac{\text{Jumlah BMD dengan Kondisi Baik}}{\text{Jumlah BMD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
					Indikator 3: Indeks Kepuasan Internal terhadap Layanan Perkantoran	Indeks Kepuasan Internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil survei internal layanan perkantoran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	77,5	78	78,5	79	79,5	80	Sekretariat
		Kepala Dinas		Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, kualitas kurikulum pendidikan, mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan, serta kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Indikator 1 : Rata-rata Lama Sekolah (tahun) (Tahun)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52	BPS
					Indikator 2 : Harapan Lama Sekolah (tahun) (Tahun)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Tahun	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58	BPS
		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar		Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indikator 1 : Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	<p>Jumlah anak usia 7 s.d.. 12 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah kesehuruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d.. 12 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d.. 12 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}}{\text{Jumlah kesehuruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d.. 12 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$</p>	%	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	Pendidikan Dasar

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (7-12)	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan $\frac{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,49	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	Rapor Pendidikan
					Indikator 3 : Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13 s.d. 15 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. $\frac{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 13 s.d. 15 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 13 s.d. 15 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 13 s.d. 15 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 13 s.d. 15 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}} \times 100\%$	%	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98	Pendidikan Dasar
					Indikator 4 : Angka partisipasi sekolah (13-15)	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan $\frac{\text{jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,39	99,49	99,59	99,69	99,8	99,9	Rapor Pendidikan
					Indikator 5 : Kemampuan literasi SD	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	65,63	68,13	70,63	73,13	75,63	78,13	Rapor Pendidikan
					Indikator 6 : Kemampuan numerasi SD	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	58,46	61,36	64,26	67,16	70,06	72,96	Rapor Pendidikan
					Indikator 7 : Kemampuan literasi SMP	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	71,14	72,24	73,34	74,44	75,54	76,64	Rapor Pendidikan
					Indikator 8 : Kemampuan numerasi SMP	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	63,38	64,88	66,38	67,88	69,38	70,88	Rapor Pendidikan
					Indikator 9 : Indeks iklim keamanan SD	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	77,15	78,05	78,95	79,85	80,75	81,65	Rapor Pendidikan
					Indikator 10 : Indeks iklim kebhinekaan SD	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	73	74	75	76	77	78	Rapor Pendidikan
					Indikator 11 : Indeks iklim inklusivitas SD	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	60,89	63,39	65,89	68,39	70,89	73,39	Rapor Pendidikan
					Indikator 12 : Indeks iklim keamanan SMP	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	70,24	71,74	73,24	74,74	76,24	77,74	Rapor Pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 13 : Indeks iklim kebhinekaan SMP	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	70,11	71,11	72,11	73,11	74,11	75,11	Rapor Pendidikan
					Indikator 14 : Indeks iklim inklusivitas SMP	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai	57,55	59,95	62,35	64,75	67,15	69,55	Rapor Pendidikan
				Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	Pendidikan Dasar
				Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Indikator 1 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan Pendidikan dasar yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	Pendidikan Dasar
			Kasi Kurikulum dan Penilaian	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dasar	Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	Pendidikan Dasar
				Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan dasar	Indikator 1 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan Pendidikan dasar yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	Pendidikan Dasar
			Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pendidikan dasar	Indikator 1 : Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d.. 12 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d.. 12 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d.. 12 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}} \times 100\%$	%	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	Pendidikan Dasar
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (7-12)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,49	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	Rapor Pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 3 : Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 s.d.. 15 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 13 s.d.. 15 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 13 s.d.. 15 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}} \times 100\%$	%	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98	Pendidikan Dasar
					Indikator 4 : Angka partisipasi sekolah (13-15)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,39	99,49	99,59	99,69	99,8	99,9	Rapor Pendidikan
			Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Indikator 1 : Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 s.d. 6 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan anak usia dini (TK dan RA) di wilayah kabupaten/kota serta terdata sebagai penduduk kabupaten/kota bersangkutan, dan peserta didik bukan penduduk kabupaten/kota (domisili) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 5 s.d. 6 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 5 s.d. 6 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan.}} \times 100\%$	%	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53	PAUD dan PNF
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (5-6)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	72,46	75,5	78,54	81,58	84,55	87,52	Rapor Pendidikan
					Indikator 3 : Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) di di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Anak Tidak Sekolah) di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 sd 18 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan di kab/kota bersangkutan.}} \times 100\%$	%	97	97,5	98	98,5	99	100	PAUD dan PNF

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
					Indikator 4 : Angka partisipasi sekolah (7-18) kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	%	37,89	38,94	39,98	41,02	42,06	43,1	Rapor Pendidikan	
					Indikator 5 : Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	$\frac{\text{Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.}} \times 100\%$	%	77,2	77,61	78,02	78,43	78,84	79,52	Rapor Pendidikan	
					Indikator 6 : Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD berijazah S1/D4}}{\text{Jumlah guru PAUD di kota/kabupaten.}} \times 100\%$	%	74,84	75,59	76,34	77,09	77,84	78,59	Rapor Pendidikan	
				Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini}} \times 100\%$	%	0	0	80	80	80	80	PAUD dan PNF	
					Indikator 2 : Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal}} \times 100\%$	%	0	0	80	80	80	80	PAUD dan PNF	
				Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Indikator 1 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan Pendidikan anak usia dini yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	PAUD dan PNF	
					Indikator 2 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan pendidikan kesetaraan yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	PAUD dan PNF	
				Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kurikulum PAUD	Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini}} \times 100\%$	%	0	0	80	80	80	80	PAUD dan PNF
					Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi PAUD	Indikator 1 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan Pendidikan anak usia dini yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	PAUD dan PNF
					Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah PAUD	Indikator 1 : Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 s.d. 6 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan anak usia dini (TK dan RA) di wilayah kabupaten/kota serta terdata sebagai penduduk kabupaten/kota bersangkutan, dan peserta didik bukan penduduk kabupaten/kota (domisili) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 5 s.d. 6 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 5 s.d. 6 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan.}} \times 100\%$	%	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53	PAUD dan PNF
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (5-6)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	72,46	75,5	78,54	81,58	84,55	87,52	Rapor Pendidikan	

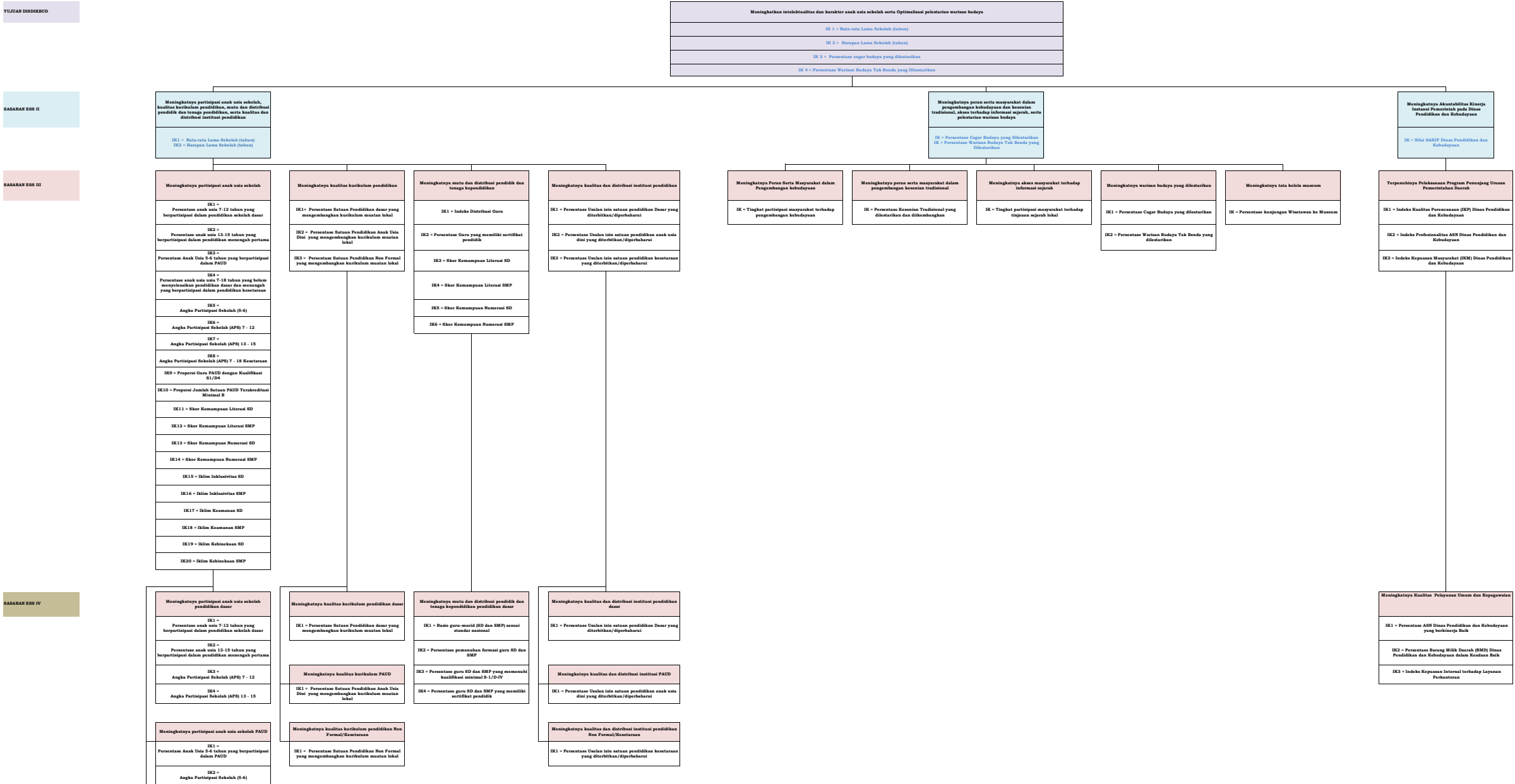
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kasi Pendidikan Non Formal	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Indikator 1 : Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal}} \times 100\%$	%	0	0	80	80	80	80	PAUD dan PNF
				Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Indikator 1 : Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	$\frac{\text{Jumlah Izin Satuan Pendidikan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui}}{\text{Jumlah Usulan Satuan pendidikan kesetaraan yang masuk}} \times 100\%$	%	0	0	100	100	100	100	PAUD dan PNF
				Sasaran 3 : Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Indikator 1 : Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Anak Tidak Sekolah) di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 sd 18 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan di kab/kota bersangkutan.}} \times 100\%$	%	97	97,5	98	98,5	99	100	PAUD dan PNF
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (7-18) kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	%	37,89	38,94	39,98	41,02	42,06	43,1	Rapor Pendidikan
			Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Indikator 1 : Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d.. 12 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d.. 12 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d.. 12 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}} \times 100\%$	%	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	Ketenagaan
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (7-12)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,49	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	Rapor Pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 3 : Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13 s.d.. 15 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 13 s.d.. 15 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 13 s.d.. 15 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan	%	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98	Ketenagaan
					Indikator 4 : Angka partisipasi sekolah (13-15)	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	%	99,39	99,49	99,59	99,69	99,8	99,9	Rapor Pendidikan
					Indikator 5 : Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5 s.d. 6 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan anak usia dini (TK dan RA) di wilayah kabupaten/kota serta terdata sebagai penduduk kabupaten/kota bersangkutan, dan peserta didik bukan penduduk kabupaten/kota (domisili) dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 5 s.d. 6 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 5 s.d. 6 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan.	%	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53	Ketenagaan
					Indikator 6 : Angka partisipasi sekolah (5-6)	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	%	72,46	75,5	78,54	81,58	84,55	87,52	Rapor Pendidikan
					Indikator 7 : Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) di di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d. 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (Anak Tidak Sekolah) di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 sd 18 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan di kab/kota bersangkutan.	%	97	97,5	98	98,5	99	100	Ketenagaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 8 : Angka partisipasi sekolah (7-18) kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$	%	37,89	38,94	39,98	41,02	42,06	43,1	Rapor Pendidikan
				Sasaran 2 : Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indikator 1 : Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan dasar}} \times 100\%$	%	57,9	62,75	67,61	72,46	77,31	82,17	Ketenagaan
					Indikator 2 : Indeks Distribusi Guru	$\frac{\text{Jumlah Guru saat ini}}{\text{Jumlah Kebutuhan Guru Ideal}} \times 100\%$	Indeks	0,64	0,66	0,68	0,70	0,73	0,77	Rapor Pendidikan
					Indikator 3 : Kemampuan literasi SD	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	65,63	68,13	70,63	73,13	75,63	78,13	Rapor Pendidikan
					Indikator 4 : Kemampuan numerasi SD	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	58,46	61,36	64,26	67,16	70,06	72,96	Rapor Pendidikan
					Indikator 5 : Kemampuan literasi SMP	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Nilai	71,14	72,24	73,34	74,44	75,54	76,64	Rapor Pendidikan
					Indikator 6 : Kemampuan numerasi SMP	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	63,38	64,88	66,38	67,88	69,38	70,88	Rapor Pendidikan
			Kasi PTK SD	Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah pendidikan dasar	Indikator 1 : Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d.. 12 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan dasar (SD, SMP, MI, MTs, baik negeri maupun swasta), dan untuk pendidikan pesantren formal terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Ula (setara SD) dan Wustha (setara SMP) di wilayah kab/kota serta terdata sebagai penduduk kab/kota bersangkutan dan peserta didik bukan penduduk (domisili) bersekolah di kab/kota bersangkutan, dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 7 s.d.. 12 tahun di wilayah kab/kota yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan dan anak berusia 7 s.d.. 12 tahun yang bukan penduduk (domisili) yang bersekolah di kab/kota bersangkutan}} \times 100\%$	%	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	Ketenagaan
					Indikator 2 : Angka partisipasi sekolah (7-12)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	99,49	99,58	99,66	99,75	99,83	99,92	Rapor Pendidikan
				Sasaran 2 : Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar	Indikator 1 : Rasio guru-murid SD sesuai standar nasional	$\frac{\text{Jumlah Total Siswa SD}}{\text{Jumlah Total Guru SD}}$	%	10,9	12	13	14	15	16	Ketenagaan
					Indikator 2 : Persentase pemenuhan formasi guru SD	$\frac{\text{Jumlah Guru SD saat ini}}{\text{Jumlah Kebutuhan Guru Ideal}} \times 100\%$	%	80	82	85	87	88	90	Ketenagaan
					Indikator 3 : Persentase guru SD yang memenuhi kualifikasi minimal S-1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru SD berijazah S1/D4}}{\text{Jumlah guru SD di kota/kabupaten.}} \times 100\%$	%	96	97	97,5	98	98,5	100	Ketenagaan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	ESS II, III dan IV	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Indikator 2 : Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	$\frac{\text{Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan}}{\text{Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
				Sasaran 5 : Meningkatnya tata kelola museum	Indikator 1 : Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke museum.}}{\text{Jumlah total kunjungan ke museum}} \times 100\%$ <p>pada tahun sebelumnya</p>	%	65,15	69,25	75,35	80,5	85,2	88,75	Kebudayaan

VISI RPJMD	LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SELAMATRA DAN BERKELANJUTAN
MISI RPJMD	M1 Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya M3 Meningkatkan sumber daya manusia yang Andal, Sehat, produktif dan kompetitif
TUJUAN RPJMD	M1 T2 Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat IK1 M1 T2- Persentase warga budaya yang dilestarikan IK2 M1 T2- Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan M3 T1 Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif IK M3 T1 - Indeks Pembangunan Manusia
SABARAN RPJMD	OPTIMALNYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA IK1- Persentase warga budaya yang dilestarikan IK2- Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan MENINGKATNYA INTELEKTUALITAS DAN KARAKTER ANAK USIA SEKOLAH IK1- Status-siswa dalam sekolah IK2- Harapan siswa sekolah



Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah pendidikan Non Formal/Keutamaan
IK1 = Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keutamaan
IK2 = Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Keutamaan

PROGRAM PENGELOAN PENDIDIKAN
IK1 = Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar
IK2 = Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
IK3 = Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
IK4 = Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keutamaan

Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan :
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp24.744.875.362
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp22.602.334.162
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp40.752.887.843
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TK Rp20.744.539.966
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp19.821.833.788
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp22.682.353.913
Pengadaan Mebel Sekolah Rp45.062.275.117
Pengadaan Perengkapan Sekolah Rp16.818.297.392
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp4.979.997.114
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp4.384.284.935
Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp4.306.312.235
Pembinaan Kelmahasiswaan dan Manajemen Sekolah Rp4.676.010.669
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp232.224.537.314
Peningkatan Kapasitas Pengabdian Dana BOS Sekolah Dasar Rp2.590.730.614
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp58.027.854.472
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Rp35.776.188.207
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp4.280.232.376
Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp2.987.959.419
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp1.915.332.376
Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp4.518.112.369
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp2.000.697.102
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp1.460.632.579
Penyediaan Infrastruktur TIK Rp16.752.992.385
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencapaian peningkatan, keberagaman, dan inovasi Rp1.845.704.517
Pengadaan Perengkapan Pustaka Didik Rp4.237.442.882
Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp54.930.870.916

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
IK1 = Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
IK2 = Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal
IK3 = Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal

Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Sub Kegiatan :
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Rp822.101.366
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Rp46.738.977
Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Sub Kegiatan :
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Rp247.365.883

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
IK1 = Indeks Distribusi Guru
IK2 = Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik

Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keutamaan
Sub Kegiatan :
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keutamaan Rp761.843.513
Pemetaan Distribusi/Rekrutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Keutamaan dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keutamaan Rp300.976.935

PROGRAM PENGENDALIAN PERINTAN PENDIDIKAN
IK1 = Persentase Unit lain satuan pendidikan Dasar yang diterbitkan/diperbarui
IK2 = Persentase Unit lain satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbarui
IK3 = Persentase Unit lain satuan pendidikan keutamaan yang diterbitkan/diperbarui

Kegiatan : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diintegrasikan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan :
Pelatihan Kelayakan Uji Perintan Pendidikan Dasar yang Diintegrasikan oleh Masyarakat Rp55.786.904
Pengendalian dan Pengawasan Perintan Pendidikan Dasar yang Diintegrasikan oleh Masyarakat Rp505.300.818
Kegiatan : Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat
Sub Kegiatan :
Pelatihan Kelayakan Uji Perintan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat Rp26.314.642
Pengendalian dan Pengawasan Perintan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat Rp176.841.285
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diintegrasikan oleh Masyarakat Rp159.999.257

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
IK = Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan

Kegiatan : Penghilangan Kebudayaan yang Menyusutkan Pahlawanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanduan Sejarah dalam Masyarakat Rp464.841.305
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Kebudayaan Rp457.941.066
Penyusunan, Pemertakabihan, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota Rp4.011.684.244
Pembinaan Lembaga dan Prasarana Kebudayaan Rp2.501.838.736
Kegiatan : Pelestarian Kearifan Tradisional yang Menyusutkan Pahlawanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanduan Tradisional yang Menyusutkan Pahlawanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp50.744.760.221
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Tradisional Rp16.483.990.966
Kegiatan : Pembinaan Lembaga adat yang Penguatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanduan Lembaga Adat Rp7.563.851.512
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasarana Adat Rp26.799.287.164
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Rp14.991.495.460

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
IK = Persentase Kearifan Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan

Kegiatan : Pembinaan Kearifan yang Menyusutkan Pahlawanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kearifan Tradisional Rp1.157.748.812
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kearifan Tradisional Rp7.397.174.912

PROGRAM PEMBIANAN SE-JARAH
IK = Tingkat partisipasi masyarakat terhadap layanan se-jaroh lokal

Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Rp1.490.831.539
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Rp28.184.357
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Rp52.564.453

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOAN SAGAR BUDAYA
IK1 = Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan
IK2 = Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Pendafaran Objek Diduga Cagar Budaya Rp548.551.539
Penetapan Cagar Budaya Rp4.703.008.220
Pengawasan Warisan Budaya Tak Benda Rp1.476.209.651
Kegiatan : Penghilangan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Perlindungan Cagar Budaya Rp1.077.025.166
Pengembangan Cagar Budaya Rp2.822.297.712
Pemertakabihan Cagar Budaya Rp4.103.353.849
Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemanduan Kebudayaan Rp1.262.798.604

PROGRAM PENGELOAN PERMUSEUMAN
IK = Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum

Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perencanaan Rp1.490.831.539
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Rp1.065.181.530
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Rp7.512.159
Revisi Sarana dan Prasarana Museum Rp7.512.159
Pengelolaan Eksternal Museum Rp484.173.422

PROGRAM PERUNJUKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
IK = Persentase Pemenuhan Penjangkauan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan : Pemenuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Penjangkauan Perangkat Daerah Rp219.427.796
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen BKA-SKPD Rp103.211.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan BKA-SKPD Rp103.211.500
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp103.211.500
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp103.211.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD Rp175.771.871
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp128.610.370
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Uji dan Tes/ujian ASN Rp2.077.706.341.869
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp195.743.856
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp118.497.921
Kegiatan : Administrasi Berang Muka Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Paksiun Dinas kebaya Arsitek Kelengkapan Rp1.830.697.141
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp1.191.268.141
Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp1.719.187.599
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp544.747.261
Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor Rp3.027.373.054
Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga Rp1.901.053.899
Penyediaan Bahan/Material Rp1.728.694.069

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp47.746.976.519
Penyenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp4.698.861.706
Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp1.338.700.024
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp4.329.143.058
Pengadaan Alat Praktik dan Peralat Peserta Didik Rp32.186.813.997
Kegiatan : Pengujian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan :
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp22.641.334.997
Pembangunan Perputakaan Sekolah Rp34.340.476.732
Pembangunan Laboratorium Rp23.640.476.732
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp33.300.176.866
Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp23.469.238.682
Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp12.400.819.828
Rehabilitasi Gedung/Berat Perputakaan Sekolah Rp16.008.145.924
Rehabilitasi Gedung/Berat Laboratorium Rp15.160.692.103
Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp42.469.707.171
Pengadaan Mebel Sekolah Rp20.853.820.656
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp3.903.840.157
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp10.211.451.822
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp2.002.760.772
Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp3.597.546.613
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Rp4.918.269.337
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp106.216.939.676
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp1.261.632.579
Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp3.291.180.914
Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp1.397.732.662
Pelatihan Penguasaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp2.979.336.870
Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp7.666.664.329
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp1.763.028.601
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp1.001.632.579
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penguatan peranadangan, keberagaman, dan inklusi Rp1.475.732.126
Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp4.661.524.687
Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp20.991.764.720
Pengadaan Peralengkapan Peserta Didik Rp2.911.152.068
Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp24.193.358.627
Pengadaan Alat Praktik dan Peralat Peserta Didik Rp24.847.630.054
Penyediaan Infrastruktur TIK Rp4.152.992.385
Kegiatan : Pengujian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan :
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp18.921.314.301
Pengadaan Mebel PAUD Rp16.725.997.132
Pengadaan Peralengkapan PAUD Rp12.543.246.876
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.767.862.587
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD Rp1.261.632.579

Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp1.233.735.441
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp1.824.051.316
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp928.021.339
Pengadaan Mebel Rp344.985.903
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp619.648.208
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp608.398.885
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp691.985.903
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp1.305.656.375
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Sertifikasi Rp90.018.224
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp24.967.013
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor Rp19.848.208
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp1.230.901.682
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp629.250.446
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp1.360.494.238
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp1.783.775.269
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp468.752.984
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp1.180.216.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp426.493.339
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Rp289.150.472

Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp4.088.439.339
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen PAUD Rp2.837.473.991
Pengalasan Dana BOP PAUD Rp34.307.818.707
Peningkatan Kapasitas Pengalasan Dana BOP PAUD Rp2.156.311.004
Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp2.831.487.431
Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp1.554.465.271
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp2.328.532.734
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp1.887.162.753
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp19.171.176.308
Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp20.204.571.938
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Rp1.271.516.877
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp1.974.706.121
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Rp1.026.263.033
Pengadaan Peralengkapan Peserta Didik Rp2.908.644.978
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp19.094.563.881
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp4.087.975.639
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp8.847.920.440
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp8.728.263.256
Kegiatan :
Pengalasan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan :
Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp2.307.077.236
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp1.445.100.477
Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp1.629.131.040
Pembinaan Kembangkan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp3.459.468.137
Pengalasan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp23.064.374.988
Peningkatan Kapasitas Pengalasan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp1.159.984.435
Pembinaan Penguasaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp2.875.332.376
Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp2.906.459.419
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp2.144.259.547
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp1.299.384.580
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp918.645.299
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Rp873.780.555
Pengadaan Peralengkapan Peserta Didik Rp2.603.567.304
Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp27.410.341.417
Pengadaan Peralengkapan Sekolah Rp41.181.164.925
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp13.384.375.392
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Jasa Magang/PKI untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp2.449.090.647
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp2.817.906.117
Pengadaan Mebel Sekolah Rp14.620.070.864
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Rp2.247.317.028
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Rp17.195.901.574
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp22.893.846.410

Catatan :
- Indikator Kegiatan = Indikator masing-masing Subkegiatan